

**PERAN JEPANG DALAM KONFLIK PERANG DAGANG AMERIKA
SERIKAT DAN TIONGKOK PADA TAHUN 2019-2025**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

RADITA PRIDA HADI

21323108

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

PERAN JEPANG DALAM KONFLIK PERANG DAGANG AMERIKA

SERIKAT DAN TIONGKOK PADA TAHUN 2019-2025

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

RADITA PRIDA HADI

21323108

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN JEPANG DALAM KONFLIK PERANG DAGANG AMERIKA
SERIKAT DAN TIONGKOK PADA TAHUN 2019-2025**
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

3 Oktober 2025

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karnia
Karnia Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Ayu Heryati Naqsbandiyah, S.IP., M.A.
- 2 Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

[Handwritten signatures]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 03 Oktober 2025



Radita Prida Hadi

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
ABSTRAK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Cakupan penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	18
1.8 Metode Penelitian	20
1.8.1 Jenis Penelitian	20
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	20
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	20
1.8.4 Proses Penelitian	20
1.9 Sistematika Pembahasan	21
BAB 2 ANALISIS <i>FOREIGN POLICY ROLE PERFORMANCE</i> DAN <i>NATION'S STATUS</i> PADA PERAN JEPANG	22
2.1. Perang dagang	22
2.2 <i>Foreign Policy Role Performance</i>	24
2.3 <i>Nation's Status</i>	27
BAB 3 PENGARUH <i>ALTER ROLE PRESCRIPTIONS</i> DAN <i>POLICY MAKERS NATIONAL ROLE CONCEPTION</i> DALAM KEBIJAKAN JEPANG	34
3.1. <i>Alter Role Prescription</i>	34
3.1.1 <i>System Structure</i>	35
3.1.2 <i>System Wide Value</i>	38
3.1.3 <i>General Legal Principles</i>	40

<i>3.1.4 Treaty Commitments</i>	43
<i>3.1.5 World Opinion</i>	46
<i>3.2 Policy Makers National Role Conception</i>	47
<i>3.2.1 Resources Of Sstate Capabilities</i>	48
<i>3.2.2 Socio-Economic Needs</i>	50
<i>3.2.3 National Value</i>	58
<i>3.2.4 Ideology</i>	60
<i>3.2.5 Public Opinion</i>	61
BAB 4 PENUTUP	65
2.1. Kesimpulan	65
2.2 Rekomendasi	66
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data ekspor impor tahunan Jepang	51
Tabel 2 Data ekspor dengan Amerika dan Tiongkok.....	52
Tabel 3 Data impor dengan Amerika dan Tiongkok.....	54

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Data ekspor dengan Amerika dan Tiongkok	52
Grafik 2 Data impor dengan Amerika dan Tiongkok	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur teori peran K.J Holsti	18
--	----

DAFTAR SINGKATAN

AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
CPTPP	: <i>Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership</i>
FOIP	: <i>Free and Open Indo-Pacific</i>
G7	: <i>Group of Seven</i>
G20	: <i>Group of Twenty</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
JATARA	: <i>Japan–America Trade Agreement</i>
JETRO	: <i>Japan External Trade Organization</i>
MC12	: <i>12th Ministerial Conference</i>
METI	: <i>Ministry of Economy, Trade and Industry</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
QUAD	: <i>Quadrilateral Security Dialogue</i>
RCEP	: <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
TPRM	: <i>Trade Policy Review Mechanism</i>
TPP	: <i>Trans-Pacific Partnership</i>

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Jepang dalam konflik perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok periode 2019–2025 dengan menggunakan teori peran K.J. Holsti. Jepang berada pada posisi strategis karena memiliki hubungan keamanan erat dengan Amerika Serikat dan ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok. Melalui pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, penelitian ini menelaah empat elemen utama teori peran: *alter role prescriptions*, *national role conception*, *nation's status*, dan *foreign policy role performance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang berperan sebagai negara active independent, yaitu aktor yang aktif dalam sistem internasional namun tetap menjaga kemandirian kebijakan luar negeri. Jepang menyeimbangkan kepentingan keamanan dan ekonomi melalui diplomasi multilateral, kebijakan economic security, serta komitmen terhadap tatanan perdagangan bebas berbasis aturan (*rules-based order*). Peran ini menegaskan bahwa Jepang bukan penengah, melainkan negara menengah (*middle power*) yang adaptif dan mandiri dalam menjaga stabilitas ekonomi kawasan di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok.

Kata-kata kunci: Jepang, perang dagang, Amerika Serikat, Tiongkok, role theory

ABSTRACT

This study analyzes Japan's role in the trade conflict between the United States and Tiongkok for the 2019–2025 period using K.J. Holsti's role theory. Japan occupies a strategic position due to its close security relationship with the United States and economic dependence on Tiongkok. Using a qualitative approach and literature study methods, this study examines four main elements of role theory: changing role prescriptions, national role conceptions, national status, and foreign policy role performance. The results show that Japan plays a role as an active independent state, namely an actor that is active in the international system but still maintains an independent foreign policy. Japan balances security and economic interests through multilateral diplomacy, economic security policies, and a commitment to a rules-based free trade order. This role emphasizes that Japan is not a mediating state, but rather an adaptive and independent middle power in maintaining regional economic stability amidst competition between the United States and Tiongkok.

Keywords: Japan, trade war, United States, Tiongkok, role theory

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan salah satu konflik ekonomi terbesar pada abad ke-21 yang menandai perubahan tatanan ekonomi global. Konflik tersebut dimulai pada tahun 2018, ketika presiden Donald Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap berbagai produk impor dari Tiongkok senilai ratusan miliar dolar. Kebijakan tersebut didorong oleh tuduhan bahwa Tiongkok melakukan praktik perdagangan tidak adil, seperti pencurian hak kekayaan intelektual, subsidi industri yang berlebihan, serta manipulasi nilai tukar untuk mendorong ekspor. Tiongkok membalas dengan menerapkan tarif serupa terhadap produk-produk Amerika Serikat, yang memicu ketegangan perdagangan antara dua negara tersebut (Kementerian pertahanan Republik Indonesia 2025).

Perang dagang ini tidak hanya berakar pada defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok yang mencapai lebih dari USD 300 miliar per tahun, tetapi juga mencerminkan persaingan strategis dalam bidang teknologi, industri, dan geopolitik. Amerika Serikat berupaya mempertahankan dominasinya dalam ekonomi dan inovasi global, sementara Tiongkok berambisi memperkuat posisinya melalui kebijakan *made in Tiongkok 2025*. Persaingan tersebut kemudian berkembang menjadi perang teknologi, ditandai dengan pembatasan akses perusahaan Tiongkok terhadap teknologi semikonduktor dan perangkat lunak buatan Amerika Serikat, yang semakin memperdalam ketegangan antara kedua negara (Taufani 2023).

Dampak dari konflik ini tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak, tetapi juga menyebar ke seluruh dunia melalui gangguan rantai pasok global (*global supply chain*), fluktuasi harga komoditas, serta meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan internasional. Negara-negara mitra dagang utama seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara ASEAN turut terkena imbasnya, baik melalui penurunan ekspor, perubahan arus investasi, maupun pergeseran pusat produksi global. Perusahaan multinasional mulai melakukan relokasi produksi dari Tiongkok ke negara lain untuk menghindari tarif tinggi dan risiko geopolitik, yang pada akhirnya mengubah struktur perdagangan dan produksi di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara (Camellia 2025).

Sebagai ekonomi terbesar ketiga di dunia, Jepang memiliki keterkaitan ekonomi dengan kedua negara tersebut. Di satu sisi, Jepang merupakan sekutu utama Amerika Serikat, baik dalam bidang keamanan maupun ekonomi. Jepang turut mendukung beberapa kebijakan yang berkaitan dengan keamanan ekonomi, seperti pengawasan ekspor teknologi canggih dan perlindungan rantai pasok global. Namun di sisi lain, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Jepang dan menjadi pasar utama bagi banyak perusahaan Jepang, khususnya di sektor otomotif, elektronik, dan semikonduktor. Ketergantungan ekonomi ini menempatkan Jepang dalam posisi dilematis antara kepatuhan terhadap kebijakan sekutu dan perlindungan terhadap kepentingan ekonominya sendiri (Kazunobu and Keiko 2025).

Sejak 2019, kebijakan Amerika Serikat yang membatasi akses Tiongkok terhadap teknologi semikonduktor dan produk berteknologi tinggi memicu efek domino bagi perekonomian Jepang. Perusahaan Jepang yang terlibat dalam rantai

pasok global khususnya produsen bahan kimia, mesin presisi, dan komponen semikonduktor menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan ekspor antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pemerintah Jepang kemudian mengambil langkah kebijakan yang lebih berhati-hati dengan menekankan pentingnya *economic security* (keamanan ekonomi), diversifikasi pasar, serta penguatan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara dan sekutu barat. Strategi ini diwujudkan melalui kebijakan *friendshoring* yakni relokasi industri ke negara mitra yang lebih aman secara politik dan ekonomi guna menjaga keberlanjutan rantai pasok nasional (Searight 2024).

Selain itu, periode 2019–2025 juga mencakup berbagai dinamika global yang memperkuat dampak perang dagang terhadap posisi Jepang, seperti pandemi COVID-19, krisis logistik global, serta meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Kondisi ini mendorong Jepang untuk memperkuat daya tahan ekonomi melalui inovasi industri, peningkatan kemandirian teknologi, *serta partisipasi aktif dalam forum perdagangan multilateral seperti CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) dan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)*. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Jepang tidak hanya menjadi korban dari perang dagang, tetapi juga memainkan peran aktif dalam menata ulang tatanan perdagangan global (Fukunari 2024).

Dari perspektif ekonomi internasional, konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menciptakan fenomena *trade diversion* dan *supply chain rerouting*, di mana negara ketiga seperti Jepang mendapatkan peluang sekaligus tantangan baru. Beberapa sektor industri Jepang memperoleh keuntungan dari

pembatasan ekspor Tiongkok, sementara sektor lain menghadapi risiko penurunan permintaan dan kenaikan biaya produksi akibat fragmentasi rantai pasok.(Xing 2024).

Jepang mengedepankan strategi diplomasi yang berlandaskan prinsip etika, seperti netralitas, transparansi, dan komitmen terhadap hukum internasional. Jepang secara aktif berpartisipasi dalam forum multilateral, seperti G20 (*Group of twenty*), *ASEAN plus three*, dan *east asia summit*, yang dapat menjadi platform untuk memfasilitasi dialog antara kedua negara. Jepang dapat memanfaatkan forum-forum tersebut untuk mendorong diskusi konstruktif atau menyampaikan pandangan yang seimbang terkait isu-isu yang menjadi perhatian bersama antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain itu, komitmen Jepang terhadap hukum internasional dan tatanan multilateral dapat menjadi landasan bagi seruan kepada kedua negara untuk mematuhi norma dan aturan internasional dalam menyelesaikan perbedaan (Katriana 2023).

Jepang berhasil memfasilitasi pertemuan penting antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada KTT G20 yang diselenggarakan di Osaka tahun 2019. Pertemuan ini dianggap sebagai langkah positif untuk meredakan ketegangan dan membuka peluang bagi dialog lebih lanjut. KTT G20 Osaka juga menghasilkan deklarasi Osaka yang mencakup komitmen untuk memperkuat perdagangan bebas, reformasi organisasi perdagangan dunia (WTO), serta pengembangan ekonomi digital dan pemberdayaan perempuan. Meskipun demikian, pertemuan bilateral antara Trump dan Xi tetap menjadi sorotan utama, mencerminkan bahwa Jepang berusaha

memfasilitasi pertemuan bilateral kedua negara tersebut (Ministry of Foreign Affairs People's Republic of China 2019).

Jepang berupaya melakukan mediasi terpisah dengan kedua negara tersebut sebagai bentuk strategi diplomatiknya dalam menghadapi ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, Jepang berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonominya dengan Tiongkok dan komitmen aliansinya dengan Amerika Serikat. Pada Juli 2025, Amerika Serikat dan Jepang melakukan pertemuan bilateral. Dalam pertemuan tersebut Jepang menekankan Amerika Serikat agar menurunkan tarif otomotif dan membuka akses pasar secara lebih adil, sementara Amerika Serikat mendorong Jepang meningkatkan investasi industri hingga 550 miliar dolar. Jepang menegaskan bahwa kebijakan perdagangannya berlandaskan pada prinsip perdagangan bebas dan hukum internasional, bukan pada tekanan sepihak dari Amerika Serikat (The White House 2025).

Jepang juga melakukan pendekatan diplomatik yang hati-hati terhadap Tiongkok untuk memahami dan menyalurkan perspektif Tiongkok di tengah perang dagang. Upaya ini terlihat dalam pertemuan bilateral di Beijing pada April 2025, dalam pertemuan tersebut, pihak Tiongkok menyerukan agar Jepang bekerja sama dalam menghadapi tekanan tarif Amerika Serikat terhadap ekspor Tiongkok. Jepang menanggapi dengan menekankan pentingnya menjaga stabilitas rantai pasok dan memperkuat kerjasama ekonomi kawasan (Ministry of Foreign Affairs People's Republic of China 2025).

Peran Jepang dalam konflik ini mencakup upaya untuk menciptakan aturan yang adil dan transparan terkait perdagangan teknologi tinggi, seperti perlindungan paten, standar keamanan teknologi, serta regulasi alih teknologi antar negara. Jepang berusaha memastikan bahwa kebijakan proteksionisme atau pengendalian teknologi tidak merugikan kerjasama internasional dalam pengembangan teknologi baru. Selain itu, Jepang turut secara aktif dalam mendorong dialog internasional terkait etika penggunaan teknologi tinggi, terutama dalam hal keamanan siber dan pengaruhnya terhadap stabilitas global (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2020).

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2019 sampai 2025 memberikan dampak langsung bagi Jepang, terutama dalam sektor ekonomi. Sebagai negara yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, Jepang menghadapi tekanan besar akibat terganggunya rantai pasok regional. Banyak perusahaan Jepang yang beroperasi di Tiongkok mengalami kesulitan karena tarif yang lebih tinggi dan kebijakan pembatasan ekspor, yang meningkatkan biaya produksi. Selain itu, ketegangan ini menciptakan ketidakpastian pasar, sehingga investor lebih berhati-hati, yang pada akhirnya memengaruhi nilai tukar yen dan pasar saham Jepang (Yamazaki 2024).

Dampak perang dagang juga terlihat pada penurunan ekspor Jepang. Pada April 2019, ekspor Jepang turun sebesar 2,4% dibandingkan tahun sebelumnya, menandai penurunan untuk bulan kelima berturut-turut. Penurunan ekspor juga terjadi pada Juli 2025 sebesar 2,6% akibat ketidakpastian perdagangan global yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain itu, pemerintah Jepang merevisi proyeksi pertumbuhan ekonominya untuk pertama kalinya dalam tiga

tahun, mengindikasikan kekhawatiran terhadap dampak negatif perang dagang terhadap perekonomian nasional (sef 2025)

Dengan melihat dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa Jepang tidak hanya berperan sebagai pengikut kebijakan kekuatan besar, melainkan juga menunjukkan kemandirian dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya. Menurut K.J. Holsti dalam bukunya *International politics: A Framework for Analysis (1981)* Jepang dapat dikategorikan sebagai negara *active independent*, yaitu negara yang secara aktif berpartisipasi dalam sistem internasional, berusaha memelihara stabilitas melalui diplomasi multilateral, namun tetap menjaga otonomi kebijakan nasional tanpa sepenuhnya bergantung pada satu kekuatan besar (Holsti 1981, 131).

Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti karena posisi Jepang dalam perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok menunjukkan dinamika yang tidak biasa. Sebagai sekutu dekat Amerika Serikat, Jepang seharusnya dapat menampilkan peran sebagai *faithful ally* atau *liberation supporter* sesuai klasifikasi K.J. Holsti (Holsti 1981, 133). Namun, kenyataannya Jepang justru mengambil peran sebagai *active independent*. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana Jepang, sebagai sekutu tradisional Amerika Serikat, mampu mempertahankan kemandiriannya dan memainkan peran konstruktif di tengah rivalitas dua kekuatan besar dunia.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Jepang dalam menghadapi konflik perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2019 sampai 2025 dikawasan Asia timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran yang diambil Jepang dalam ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok
2. Memahami faktor-faktor yang memengaruhi upaya Jepang dalam menghadapi ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Asia timur

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini dibatasi pada peran Jepang dalam menghadapi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dengan fokus utama pada tahun 2019 sampai 2025. Tahun ini dipilih karena pada tahun 2019 Presiden Amerika Serikat meningkatkan biaya impor ke produk Tiongkok, yang pada awalnya kenaikan biaya dari 25% menjadi 30% untuk barang senilai sekitar \$250 miliar, serta penambahan tarif 10% hingga 15% pada barang tambahan senilai \$300 miliar. Kebijakan ini berdampak luas pada perdagangan global dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha di berbagai sektor. Sementara itu, pada tahun 2025 perang dagang tersebut masih terjadi. Analisis dalam penelitian ini akan menyoroti kebijakan luar negeri Jepang, langkah-langkah diplomasi yang diambil, serta dampaknya terhadap stabilitas perdagangan Jepang. Penelitian ini tidak akan membahas secara mendalam faktor internal yang mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat dan Tiongkok, melainkan lebih berfokus pada strategi Jepang dalam merespons ketegangan tersebut.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini digunakan untuk membandingkan dan mengevaluasi hasil penelitian dengan penelitian yang terdahulu. Selain itu, tinjauan pustaka juga membantu menghindari kesamaan dengan penelitian milik orang lain..

Pertama, jurnal yang berjudul *Japan's strategy amid US-China confrontation* oleh Ryo Sahashi tahun 2020. Pada jurnal ini membahas terkait strategi Jepang dalam menghadapi ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Fokus utamanya adalah memastikan pertahanan nasional dan kemakmuran ekonomi dengan mempertahankan aliansi Jepang dengan Amerika Serikat serta mempromosikan integrasi sosioekonomi di Asia. Jepang berusaha menciptakan tatanan institusional berdasarkan nilai-nilai universal. Pendekatan ini mengakui bahwa tujuan jangka panjang memerlukan kerjasama dengan negara-negara yang sedang mengintegrasikan diri ke dalam tatanan politik dan ekonomi dunia, serta memprioritaskan stabilitas. Selama konfrontasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Jepang menghadapi tantangan mempertahankan posisi strategis kompleks dalam segitiga Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Respon Jepang terhadap realitas baru ini adalah memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat dan memperkuat kemitraan internasional untuk mempromosikan tatanan institusional yang diinginkan, sambil tetap menjalankan diplomasi dengan Tiongkok. Perbedaan dengan penelitian ini adalah, penelitian ini membahas tentang peran Jepang dalam ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2019 sampai 2025 (Sahashi 2020, 233).

Kedua, Jurnal yang berjudul *Middle Power Diplomacy in an Age of U.S.-China Tensions* yang ditulis oleh Erik Brattberg tahun 2021. Pada jurnal ini

membahas tentang peran negara-negara dengan kekuatan menengah (*middle power*) dalam menghadapi ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Negara-negara ini, yang juga merupakan sekutu demokratis tradisional Amerika Serikat dan semakin aktif mencari solusi multilateral terhadap berbagai tantangan regional dan global, terutama ketika kepemimpinan dari Amerika Serikat kurang terasa. Jurnal ini menyoroti bagaimana diplomasi negara-negara kekuatan menengah dapat memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban berbasis aturan dan multilateralisme, terlepas dari persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Perbedaan dengan penelitian, yaitu penelitian ini hanya berfokus ke peran negara Jepang dalam menghadapi ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok (Brattberg 2021, 219).

Ketiga, buku yang berjudul *Keamanan Asia Timur: Realitas, Kompleksitas, dan Rivalitas* oleh Najeri Al Syahrin tahun 2019. Buku ini membahas upaya Jepang dalam menjembatani Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Asia Timur. Jepang berusaha menjaga hubungan baik dengan kedua negara adikuasa ini dengan tidak memihak salah satu pihak dalam konflik Amerika Serikat dan Tiongkok. Buku ini juga membahas tentang keaktifan Jepang dalam dialog dan kerja sama multilateral, seperti ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dan EAS (*East Asia Forum*). Jepang mendukung penyelesaian sengketa secara damai di kawasan, seperti di Laut Tiongkok Selatan. Menurut buku ini, Jepang memainkan peran penting dalam menjembatani Amerika Serikat dan Tiongkok di Asia Timur. Upaya Jepang ini mendukung stabilitas dan keamanan di kawasan, serta memajukan kerja sama ekonomi dan pertukaran budaya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus

pada analisis peran Jepang dalam menghadapi ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di tahun 2019 sampai 2025 dengan menggunakan teori peran atau *role theory* (Syahrin 2019, 31).

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai peran Jepang dalam menghadapi ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2019 hingga 2025 telah menjadi fokus sejumlah studi sebelumnya. Sahashi (2020) menekankan pentingnya aliansi Jepang - Amerika Serikat dan upaya Jepang dalam mempromosikan integrasi sosioekonomi di Asia. Brattberg (2021) lebih luas membahas peran negara-negara kekuatan menengah, termasuk Jepang, dalam menjaga ketertiban berbasis aturan. Al Syahrin (2019) menyorot upaya Jepang dalam menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Tiongkok serta keaktifannya dalam forum multilateral. *Novelty* atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus yang lebih spesifik pada upaya terbaru Jepang di tahun 2019 sampai 2025 dalam menghadapi ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain itu, penggunaan *role theory* untuk menganalisis peran Jepang serta keterlibatan Jepang dalam studi kasus tersebut merupakan pendekatan yang inovatif.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti memilih teori peran (*role theory*) menurut K. J. Holsti. Teori peran (*role theory*) ini mengutamakan peran yang diambil suatu negara berdasarkan harapan domestik, internasional, dan identitas nasional.

Menurut K. J. Holsti (Holsti 1970, 239) dalam konteks suatu negara, teori peran dapat digunakan untuk memahami bagaimana berbagai aktor politik, seperti pemimpin politik, partai politik, kelompok kepentingan, dan warga negara,

berperan serta dalam proses politik. Interaksi mereka memengaruhi pengambilan keputusan serta dinamika sistem politik secara keseluruhan. Teori ini dianggap relevan dalam menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang dalam menghadapi ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2019 sampai 2025. K.J. Holsti menjelaskan bahwa terdapat empat faktor utama yang saling memengaruhi dalam menentukan peran suatu negara di panggung internasional. Empat faktor tersebut meliputi:

1. *Foreign Policy Role Performance*

Konsep ini menggambarkan sejauh mana suatu negara benar-benar bertindak sesuai dengan peran yang mereka bayangkan atau klaimkan, serta bagaimana peran tersebut diwujudkan dalam hubungan internasional melalui keputusan, komitmen, dan kebijakan luar negeri yang diambil. Dengan kata lain, ini merupakan ukuran atau realisasi dari konsep peran nasional yang dimiliki pembuat kebijakan dalam konteks sistem internasional (Holsti 1981, 138).

2. *Nations Status*

Konsep ini mengacu pada persepsi para pembuat kebijakan mengenai peran yang seharusnya dimainkan oleh negara mereka dalam sistem internasional. Holsti mendefinisikan *Nation's Status* sebagai definisi para pembuat kebijakan sendiri tentang jenis keputusan, komitmen, aturan, dan tindakan yang sesuai bagi negara mereka, serta fungsi-fungsi apa saja yang seharusnya dijalankan secara berkelanjutan dalam sistem internasional atau sistem regional yang lebih kecil (Holsti 1981, 8).

3. *Alter Roles Prescription*

Faktor eksternal yang dapat memengaruhi perumusan kebijakan serta peran yang diadopsi dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Holsti, faktor ini mengkaji bagaimana tekanan atau ekspektasi dari faktor eksternal dapat mendorong suatu negara untuk mengadopsi peran atau kebijakan tertentu. Faktor ini merujuk pada ekspektasi eksternal terhadap suatu negara yang dapat memengaruhi kebijakan luar negerinya. Ekspektasi ini dapat berasal dari negara lain, organisasi internasional, maupun norma global yang berkembang (Holsti 1981, 22). Ekspektasi ini terbentuk dari beberapa elemen utama, yaitu:

a) *System structure*

Merujuk pada susunan keseluruhan hubungan antar-negara dan pola interaksi internasional yakni siapa aktornya, bagaimana mereka saling berhubungan (kekuatan, ekonomi, ideologi, diplomasi), aturan yang mengatur hubungan tersebut, dan subsistem/blok regional atau ideologis yang terbentuk (Holsti 1981. 93).

b) *System wide value*

menjelaskan bahwa nilai-nilai sistem internasional (*systemic values*) dapat memengaruhi tujuan dan kebijakan luar negeri suatu negara. Nilai-nilai ini bukan hanya bersifat lokal, tapi juga mencerminkan pandangan dan norma yang berlaku secara global pada suatu periode sejarah (Holsti 1981. 381).

c) *General legal principles*

Mengacu pada prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang berlaku secara universal. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan hukum di berbagai konteks serta situasi, khususnya dalam penyelesaian masalah di suatu negara (Holsti 1970, 246)

d) *Treaty commitments*

Menggambarkan bagaimana perjanjian global yang telah disetujui oleh berbagai negara dapat mempengaruhi peran suatu negara dalam perumusan kebijakan. Perjanjian ini bersifat mengikat, mengatur hak dan kewajiban negara-negara yang menjadi pihak dalam kesepakatan tersebut (Holsti 1981, 146)

e) *World opinion*

Menjelaskan bagaimana pandangan publik global dapat mempengaruhi suatu negara. Faktor ini berperan dalam membentuk reputasi, legitimasi, serta otoritas negara di tingkat internasional. (Holsti 1981, 431)..

4. *Policy Makers National Role Conception*

Kemudian faktor kedua ini mengacu pada proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan dan fungsi yang dianggap relevan bagi negara mereka sendiri, serta diharapkan dapat diterapkan di lingkungan internasional. *National Role Conception* berperan penting dalam penetapan kebijakan luar negeri, karena dapat menentukan arah serta keberlanjutan suatu negara di kancah global (Holsti 1981, 130). Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, seperti:

a) *Location*

letak geografis (location) adalah salah satu faktor domestik utama yang membantu membentuk bagaimana para pembuat kebijakan memahami peran negaranya (Holsti 1981, 124).

b) *Resources of state capabilities*

Faktor ini menggambarkan sejauh mana kemampuan sumber daya suatu negara seperti ekonomi, militer, teknologi, dan sumber daya manusia dapat mendukung pelaksanaan kebijakan luar negeri. Ketersediaan dan kekuatan sumber daya ini memengaruhi kemampuan negara dalam mencapai tujuan politiknya serta menentukan posisi dan pengaruhnya di area global (Holsti 1981, 169).

c) *Socio-economic needs*

Socio-economic needs adalah kebutuhan sosial dan ekonomi yang mendorong negara membentuk serta melaksanakan peran nasionalnya di dunia internasional. Faktor ini menekankan pentingnya kepentingan ekonomi domestic seperti pembangunan, perdagangan, dan kesejahteraan sebagai landasan bagi kebijakan luar negeri (Holsti 1981, 150).

d) *National value*

Menjelaskan bahwa nilai-nilai dan prinsip moral yang menjadi dasar orientasi suatu negara dalam membentuk dan menjalankan peran nasionalnya di dunia internasional. Nilai ini memberi arah

normatif bagi kebijakan luar negeri dan membedakan identitas moral setiap negara (Holsti 1981, 385).

e) *Ideology*

Faktor ini berkaitan dengan keyakinan atau pandangan politik suatu negara yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan berperan dalam sistem internasional. Ideologi yang dianut akan membentuk perspektif negara terhadap dunia serta kebijakan luar negeri yang diambil. (Holsti 1981, 17).

f) *Traditional roles*

Peran tradisional menentukan bagaimana negara berinteraksi dengan lingkungan internasional dan menjalankan tanggung jawabnya di kawasan tertentu. Namun, perubahan situasi domestik maupun internasional seperti krisis ekonomi, perubahan kekuasaan, atau meningkatnya nasionalisme dapat mendorong negara untuk menyesuaikan, mengurangi, bahkan meninggalkan peran tradisionalnya guna menyesuaikan dengan kepentingan nasional dan kemampuan aktualnya di area global (Holsti 1981, 135).

g) *Public Opinion*

Faktor ini menggambarkan bagaimana sikap, harapan, serta tuntutan masyarakat dapat mempengaruhi peran negara dalam arena global. Opini publik berpengaruh terhadap keputusan dan tindakan pemimpin politik, baik dalam eksekutif maupun legislatif (Holsti 1981. 395).

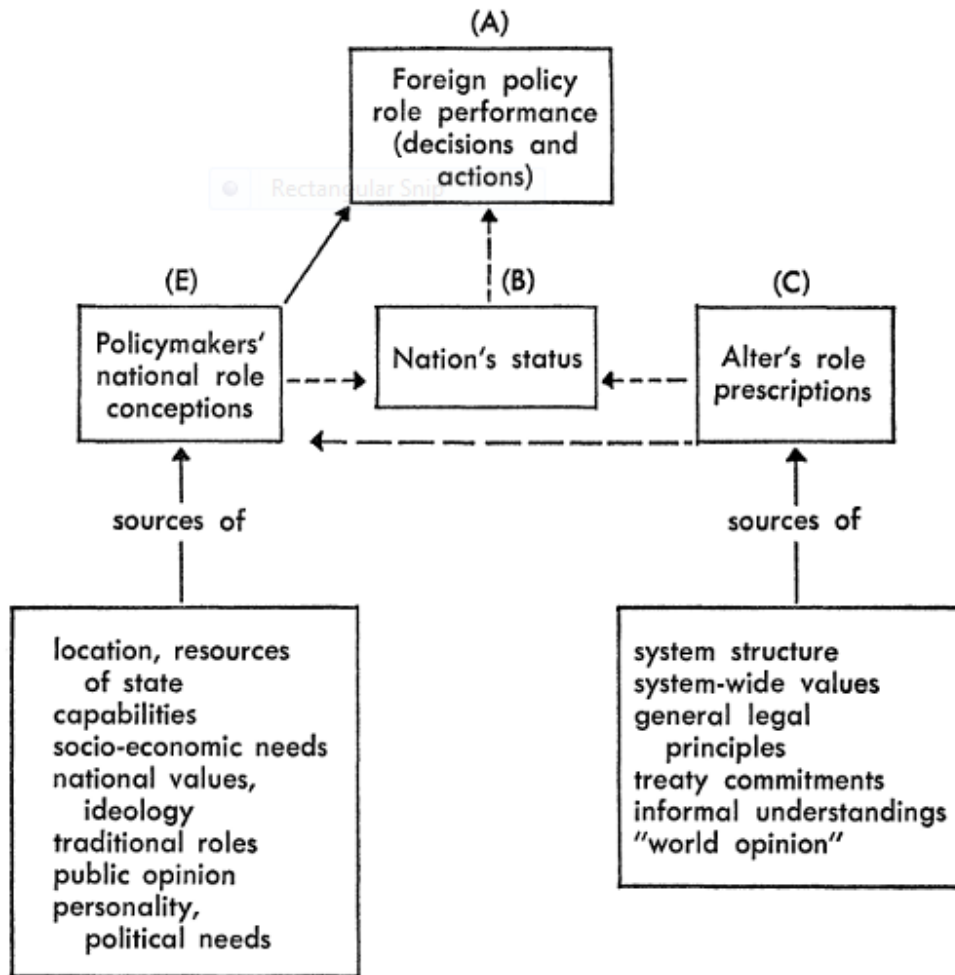
h) Personality

Kepribadian seorang pemimpin memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara. Gaya kepemimpinan serta karakter seorang pemimpin dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan strategi yang diterapkan dalam pemerintahan serta hubungan internasional (Holsti 1981, 19).

i) Political needs

Konsep ini menjelaskan bahwa kebutuhan politik suatu negara baik untuk menjaga stabilitas domestik, memperkuat legitimasi, maupun mempertahankan kedaulatan yang memengaruhi cara pembuat kebijakan menentukan dan melaksanakan peran nasionalnya di area internasional (Holsti 1981, 142).

Struktur Gambar 1 teori peran K.J Holsti



Sumber : (Holsti 1970, 245).

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan teori peran (*role theory*), peran Jepang dalam menghadapi konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2019 hingga 2025 dapat ditinjau menggunakan teori peran dari K.J. Holsti. Pertama, *Foreign Policy Role Performance*, Jepang menunjukkan peran sebagai *active independent state* dengan secara aktif memanfaatkan forum-forum regional dan internasional untuk meredakan ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Melalui partisipasinya dalam organisasi seperti *ASEAN Plus Three*,

CPTPP (*Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership*), dan RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*), Jepang berupaya menegaskan otonominya dalam kebijakan luar negeri dengan mendorong terciptanya stabilitas ekonomi kawasan serta memperkuat hubungan perdagangan yang saling menguntungkan tanpa bergantung pada dominasi salah satu kekuatan besar. Selanjutnya, *Nation's Status*, di mana Jepang, sebagai anggota G7 dan salah satu ekonomi terbesar di dunia, memiliki pengaruh dalam forum global seperti G20, WTO (*World Trade Organization*) dan RCEP. Status ini memungkinkan Jepang untuk berperan dalam menjaga stabilitas perdagangan internasional dan mendorong penyelesaian ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok secara konstruktif.

Kemudian, *Policy Makers National Role Conception*, yang menjelaskan bagaimana pemerintah Jepang, di bawah kepemimpinan Shinzo Abe sampai Shigeru Ishiba mengambil pendekatan berbasis diplomasi ekonomi. Jepang berupaya menjaga kepentingan nasionalnya dengan menekankan negosiasi dan kerja sama multilateral, bukan konfrontasi atau kebijakan proteksionisme. Terakhir, *Alter Roles Prescription*, dimana terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi Jepang dalam mengambil kebijakan, yaitu persaingan ekonomi antara kedua negara tersebut yang berdampak pada stabilitas perdagangan global. Jepang, sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia dan mitra dagang utama kedua negara, memiliki kepentingan dalam menjaga keseimbangan hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat dan Tiongkok.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Penulis akan mengkaji berbagai peristiwa yang tercatat dalam literatur terkait untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk mengeksplorasi topik yang dibahas yaitu peran Jepang dalam menghadapi konflik perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2019 sampai 2025.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pemerintah Jepang sebagai subjek, dan kebijakan dan strategi pemerintah Jepang dalam menghadapi ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai objeknya.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder, yang bersumber dari jurnal, buku, e-book, artikel ilmiah, dan laporan untuk mendapatkan informasi yang relevan.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian dan proses ini melibatkan pencarian dan seleksi sumber-sumber seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, dan laporan dari internet. Setelah mengumpulkan data, peneliti akan menganalisis dan mengategorikannya dalam bentuk bab dan subbab untuk memilih sumber-sumber yang paling relevan dengan judul penelitian. Selanjutnya, peneliti dapat membuat hipotesis sementara

berdasarkan data yang telah dianalisis dan hipotesis ini akan diperkuat dengan data-data yang ditemukan selama penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada Bab 1, dijelaskan latar belakang dinamika hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok dengan fokus pada perang dagang yang menjadi salah satu isu utama. Bab ini juga membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada Bab 2, akan analisis *foreign policy role performance & nation's status* pada peran Jepang dalam menghadapi ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Asia Timur pada tahun 2019 sampai 2025. Pada Bab 3, akan membahas mengenai peran Jepang dalam menghadapi ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Asia Timur serta analisis *alter role's prescriptions & policy makers national role conception* dalam Jepang pada tahun 2019 sampai 2025. Pada Bab 4, peneliti akan menguraikan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

ANALISIS FOREIGN POLICY ROLE PERFORMANCE DAN NATION'S STATUS PADA PERAN JEPANG

2.1. Perang dagang

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan konflik ekonomi yang bermula dari ketegangan jangka panjang mengenai ketidakseimbangan perdagangan, kebijakan industri, serta isu hak kekayaan intelektual. Sejak awal tahun 2000an, Tiongkok tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia setelah bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2001. Pertumbuhan pesat ini membuat Tiongkok menjadi pengeksport utama produk manufaktur ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Namun, peningkatan ekspor Tiongkok yang signifikan menyebabkan defisit perdagangan yang besar bagi Amerika Serikat, karena nilai impor barang dari Tiongkok jauh melampaui nilai ekspor Amerika Serikat ke negara tersebut. Ketidakseimbangan ini kemudian memunculkan kekhawatiran di pihak pemerintah Amerika Serikat terhadap ancaman terhadap industri domestik dan posisi hegemoninya dalam ekonomi global (World Trade Organization, n.d.).

Selain masalah defisit perdagangan, Amerika Serikat menuduh Tiongkok melakukan praktik perdagangan yang dianggap tidak adil, seperti subsidi besar-besaran terhadap perusahaan milik negara, manipulasi nilai tukar mata uang untuk meningkatkan daya saing ekspor, serta pencurian dan pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap teknologi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Pemerintahan Presiden Donald Trump, yang menjabat sejak 2017, menilai bahwa praktik-praktik tersebut mengancam kepentingan ekonomi dan keamanan nasional

Amerika Serikat. Sebagai respons, Amerika Serikat mulai memberlakukan tarif tinggi terhadap berbagai produk impor asal Tiongkok dengan tujuan mengurangi defisit perdagangan dan memaksa Tiongkok mengubah kebijakannya. Tindakan ini kemudian dibalas oleh Tiongkok dengan mengenakan tarif serupa terhadap barang-barang asal Amerika Serikat, sehingga memicu konflik ekonomi di antara kedua negara (BBC 2020).

Di sisi lain, perang dagang ini tidak hanya mencerminkan perselisihan ekonomi semata, tetapi juga menggambarkan perebutan dominasi global antara dua kekuatan besar dunia. Amerika Serikat berusaha mempertahankan supremasi ekonominya, sementara Tiongkok berupaya memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi dan teknologi baru melalui kebijakannya. Hal tersebut bertujuan menjadikan negara tersebut pemimpin dalam sektor teknologi tinggi. Akibatnya, perang dagang Amerika Serikat–Tiongkok berkembang menjadi simbol rivalitas strategis yang melibatkan aspek politik, keamanan, dan geopolitik global. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kedua negara, tetapi juga oleh perekonomian dunia secara keseluruhan melalui terganggunya rantai pasok global, fluktuasi pasar saham, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara (Sabadosa et al. 2024).

Sebagai satu kekuatan ekonomi global teratas, Jepang memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi. Jepang memiliki hubungan dagang dengan kedua negara tersebut dan bergantung pada kelancaran rantai pasokan global untuk menopang sektor manufakturnya. Perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Tiongkok, seperti *Mitsubishi electric* dan *Toshiba machine co*, menghadapi tekanan akibat kebijakan tarif yang diberlakukan dalam

perang dagang. Beberapa perusahaan terpaksa memindahkan produksi mereka ke negara lain, termasuk Asia Tenggara, guna menghindari dampak negatif dari kebijakan proteksionisme (Yaita 2024).

2.2 Foreign Policy Role Performance

Menurut KJ Holsti, *role performance* atau kinerja peran adalah manifestasi eksternal dari konsep peran yang dimiliki suatu negara. Jika konsep peran adalah cara sebuah negara melihat dirinya dan posisinya dalam sistem internasional (misalnya, sebagai pemimpin regional, mediator, atau negara netral), maka kinerja peran adalah bagaimana negara tersebut benar-benar bertindak dan berperilaku di panggung dunia sesuai dengan konsep peran yang dianutnya (Holsti 1970)

Holsti menjelaskan bahwa kinerja peran bukan sekadar deklarasi niat, melainkan serangkaian tindakan konkret, kebijakan luar negeri, dan interaksi diplomatik yang secara konsisten ditunjukkan oleh suatu negara. Ini adalah bukti empiris atau "*output*" dari bagaimana sebuah negara berupaya mewujudkan identitas dan tujuan yang ditetapkan dalam konsep perannya. Misalnya, jika suatu negara melihat dirinya sebagai "mediator damai," kinerja perannya akan terlihat dari upaya diplomatik yang aktif dalam menyelesaikan konflik internasional, penawaran untuk menjadi tuan rumah perundingan damai, atau partisipasi dalam misi penjaga perdamaian (Holsti 1970)

Lebih lanjut, Holsti menekankan bahwa kinerja peran juga melibatkan respons dan interaksi dengan aktor internasional lainnya. Suatu negara tidak berperan dalam ruang hampa, tindakannya akan memprovokasi reaksi dan umpan balik dari negara lain. Kinerja peran yang efektif adalah ketika tindakan suatu

negara diakui dan diterima oleh komunitas internasional sesuai dengan konsep perannya. Namun, bisa juga terjadi ketidaksesuaian antara konsep peran dan kinerja peran, di mana tindakan negara tidak konsisten dengan citra yang ingin diproyeksikannya, atau tidak diterima oleh negara lain. Inilah yang dapat memicu ketegangan dalam konsep peran itu sendiri. Singkatnya, kinerja peran adalah bagaimana sebuah negara "memainkan" perannya di kancah global (Holsti 1970)

Jepang secara rutin mengadakan pertemuan bilateral dengan Amerika Serikat dan Tiongkok secara terpisah untuk membahas isu-isu perdagangan, termasuk perang dagang. Dengan Amerika Serikat, sekutu dekatnya, Jepang sering kali melakukan pertemuan tingkat tinggi. Misalnya, kunjungan perdana menteri Jepang ke Amerika Serikat seperti yang dilakukan oleh perdana menteri Shigeru Ishiba pada februari 2025, untuk membahas perjanjian dagang Amerika Serikat-Jepang (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2025).

Di sisi lain, dengan negara Tiongkok, mitra dagang utamanya, Jepang juga menjaga jalur komunikasi yang kuat. Kunjungan menteri luar negeri Tiongkok Wang Yi ke Tokyo pada 21 Maret 2025, memiliki agenda utama seperti penguatan hubungan ekonomi bilateral, di mana Jepang dan Tiongkok harus meningkatkan rasa saling percaya dan memperkuat kerjasama dalam menghadapi masalah global (Ministry of Foreign Affairs People's Republic of China 2025).

Meskipun pertemuan trilateral yang secara spesifik melibatkan Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok untuk secara langsung membahas perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok sangat jarang terjadi, isu tersebut sering kali muncul dalam agenda diskusi pada forum trilateral atau multilateral yang lebih luas di mana ketiga negara hadir. Contohnya adalah KTT Trilateral Jepang-Tiongkok-

Korea Selatan, yang meskipun berfokus pada kerjasama regional Asia Timur, sering membahas dampak perang dagang pada stabilitas ekonomi regional dan pentingnya promosi perjanjian perdagangan bebas regional seperti RCEP. Selain itu, forum multilateral menjadi platform penting di mana para pemimpin dari Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok berinteraksi. Di forum-forum ini, isu-isu makroekonomi global, termasuk ketegangan perdagangan, selalu menjadi topik utama dalam komunikasi bersama dan diskusi di sela-sela pertemuan, dengan Jepang sering mengambil peran sebagai penyeru dialog dan stabilitas dalam sistem perdagangan multilateral (DeeMa 2025).

Jepang, sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan sangat bergantung pada sistem perdagangan multilateral yang stabil, memiliki kepentingan krusial dalam meredakan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Oleh karena itu, inisiatif diplomatik dan komunikasi yang dilakukan Jepang bersifat komprehensif, mencakup pernyataan publik formal, seruan diplomatik, serta upaya komunikasi informal atau "jalur belakang." Pendekatan ini dirancang untuk memitigasi dampak negatif perang dagang terhadap rantai pasok global dan ekonomi Jepang sendiri, sekaligus mendorong kedua negara adidaya tersebut untuk kembali ke meja perundingan. Peran Jepang bukanlah sebagai penengah yang memaksa, melainkan lebih sebagai fasilitator dan penyeru stabilitas dalam sistem internasional (CNN Indonesia 2025).

Pemerintah Jepang secara konsisten menggunakan berbagai saluran resmi untuk menyuarakan pandangannya tentang perang dagang. Ini terlihat jelas dalam pernyataan dari kementerian luar negeri atau *Ministry of Foreign Affairs* (MOFA), pidato Perdana Menteri, dan laporan dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan,

dan Industri. Secara umum, pernyataan-pernyataan ini berpusat pada tiga poin utama yaitu penyeruan dialog dan negosiasi, desakan deeskalasi dan penolakan proteksionisme, serta penawaran mediasi secara tidak langsung. Jepang selalu menekankan bahwa perselisihan perdagangan harus diselesaikan melalui mekanisme multilateral dan perundingan bilateral yang konstruktif, bukan melalui tindakan sepihak atau penerapan tarif yang dapat memperburuk situasi global. Komitmen ini tercermin dalam pidato perdana menteri Fumio Kishida yang mengatakan (Prime Minister's Office of Japan 2023).

“Jepang menggambarkan tantangan yang diajukan oleh Tiongkok sebagai tantangan yang harus ditanggapi oleh Jepang dengan kekuatan nasionalnya yang komprehensif dan bekerja sama dengan sekutunya, negara-negara yang sepemikiran, dan pihak lain. Jepang tidak akan pernah membiarkan upaya apa pun untuk mengubah status quo secara sepihak dengan kekerasan. Dengan itu, Jepang berharap dapat berkontribusi untuk memastikan perdamaian dan stabilitas internasional, termasuk di kawasan Indo-Pasifik, bersama dengan Tiongkok, dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama. Oleh karena itu, kami perlu mengelola hubungan kami secara damai. Ini adalah kunci untuk menentukan keberhasilan di era ini” (Prime Minister's Office of Japan 2023).

2.3 Nation's Status

Menurut K.J. Holsti, "*Nation's Status*" atau lebih tepatnya konsepsi peran nasional (*Nation's Role Conceptions*), bukanlah sekadar peringkat kekuatan suatu negara di panggung dunia. Sebaliknya, ini adalah pemahaman kolektif yang dimiliki para pembuat kebijakan suatu negara tentang peran ideal yang seharusnya dimainkan oleh negara mereka di kancah internasional. Ini adalah gambaran diri

yang dibentuk secara internal mengenai identitas, perilaku yang pantas, dan fungsi-fungsi berkelanjutan yang harus dijalankan negara dalam sistem internasional atau regional. Konsepsi ini bersifat subjektif dan sangat memengaruhi bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain (Holsti 1970).

Pembentukan konsepsi peran nasional ini dipengaruhi oleh beragam faktor, baik dari dalam maupun luar negeri. Secara internal, ideologi dan nilai-nilai nasional suatu negara, seperti komitmen terhadap demokrasi atau anti-kolonialisme, dapat membentuk pandangan tentang peran yang harus dimainkan. Sejarah dan tradisi, termasuk pengalaman kemerdekaan atau konflik masa lalu, juga sangat memengaruhi identitas peran. Selain itu, kebutuhan domestik seperti stabilitas ekonomi dan sosial, serta persepsi dan keyakinan pribadi para pembuat kebijakan utama, menjadi penentu penting. Faktor eksternal tak kalah penting berperan. Harapan negara lain (*alter prescription*) tentang bagaimana suatu negara harus bertindak di dunia, serta peristiwa kritis atau tren global seperti munculnya isu terorisme atau perubahan iklim, dapat memaksa negara untuk menyesuaikan atau merumuskan kembali peran mereka. Terakhir, struktur sistem internasional itu sendiri, yang bersifat anarki, juga memengaruhi pilihan peran yang diambil (Holsti 1970).

Konsepsi peran nasional ini memiliki implikasi yang mendalam terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Para pembuat kebijakan cenderung merumuskan strategi dan mengambil tindakan yang konsisten dengan peran yang mereka yakini paling cocok untuk negara mereka. Misalnya, jika suatu negara melihat dirinya sebagai "pemimpin regional," maka kebijakan luar negerinya akan

proaktif dalam isu-isu regional, seringkali menawarkan mediasi atau bantuan. Sebaliknya, jika suatu negara mengidentifikasi dirinya sebagai "negara penyeimbang," kebijakannya mungkin akan lebih berhati-hati dalam aliansi dan fokus pada menjaga keseimbangan kekuatan. Holsti sendiri mengidentifikasi berbagai jenis peran seperti "pemimpin regional," "*mediator-integrator*," atau "agen anti-imperialis," menunjukkan betapa beragamnya cara negara mendefinisikan dan memproyeksikan "status" mereka di dunia (Holsti 1970).

Menurut Yoshihide Soeya (Soeya 2012) profesor emeritus di Universitas Keio, Jepang sebaiknya mengadopsi strategi besar yang otonom sebagai kekuatan menengah (*middle power*). Soeya menekankan bahwa Jepang, meskipun memiliki pengaruh ekonomi dan strategis, tidak berambisi untuk menyaingi kekuatan besar seperti Amerika Serikat atau Tiongkok dalam hal kekuatan militer. Sebaliknya, Jepang memainkan peran aktif dalam diplomasi multilateral dan kerja sama internasional, memanfaatkan posisinya untuk berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian global. Soeya juga mencatat bahwa perilaku diplomatik Jepang mencerminkan internasionalisme khas kekuatan menengah, meskipun status dan strateginya terkadang tidak konsisten atau kurang jelas.

Namun, di bidang diplomasi dan keamanan regional, Jepang adalah aktor yang sangat proaktif. Alih-alih mengandalkan kekuatan militer ofensif, Jepang menggunakan diplomasi multilateral dan kemitraan strategis sebagai tulang punggung kebijakan luar negerinya. Jepang adalah penganut setia multilateralisme, aktif berpartisipasi dalam forum-forum global seperti G7 dan G20, di mana mereka secara konsisten mendorong norma-norma internasional,

pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan non-proliferasi nuklir (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2020).

Dalam wawancara di Tokyo, Menteri keuangan Jepang Katsunobu Kato menyatakan bahwa pemerintah Jepang sangat prihatin terhadap dampak ekonomi global dari kebijakan tarif Amerika Serikat. Ia mengatakan

“Kebijakan tarif Amerika Serikat baru-baru ini memengaruhi berbagai industri dan meningkatkan ketidakpastian. Kami sangat khawatir kebijakan ini dapat memengaruhi perekonomian Jepang, serta perekonomian global, melalui berbagai jalur seperti perdagangan dan pasar keuangan” (Yamaguchi et al. 2025).

Kato menambahkan bahwa langkah tarif Amerika Serikat dapat memberikan tekanan terhadap pemulihan ekonomi Jepang akibat volatilitas pasar yang meningkat. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah Jepang akan berkomunikasi erat dengan Amerika Serikat mengenai masalah mata uang serta menekankan pentingnya stabilitas nilai tukar agar tidak terjadi gejolak di pasar keuangan. Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran Jepang terhadap kebijakan proteksionis Amerika Serikat yang berpotensi mengganggu rantai perdagangan internasional dan menekan ekonomi domestik Jepang (Yamaguchi et al. 2025).

Jepang juga aktif dalam inisiatif keamanan regional seperti FOIP dan Quad (*Quadrilateral Security Dialogue*), yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuatan dan kebebasan navigasi di wilayah tersebut. Kontribusinya terhadap misi penjaga perdamaian PBB dan upaya pembangunan kapasitas di negara-negara berkembang juga menunjukkan komitmennya terhadap stabilitas global tanpa proyeksikan kekuatan militer ofensif. Peran Jepang dalam forum-forum

regional juga menyoroti kemampuannya untuk mempengaruhi kebijakan dan kerja sama di Asia Timur dan Tenggara, menjadikannya kekuatan yang tidak bisa diabaikan dalam dinamika regional (G7 Japan 2023).

Para pengambil kebijakan di Jepang secara konsisten memandang bahwa negaranya memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan, baik di kawasan Asia Timur maupun di wilayah Indo-Pasifik. Persepsi ini berakar kuat pada ketergantungan ekonomi Jepang yang luar biasa pada perdagangan, investasi, dan rantai pasokan global yang stabil. Sebagai negara kepulauan dengan sumber daya alam terbatas, kelangsungan hidup ekonomi Jepang secara langsung bergantung pada akses yang tidak terhambat ke pasar luar negeri dan pasokan bahan baku yang stabil. Oleh karena itu, setiap ancaman terhadap kebebasan navigasi, stabilitas regional, atau tatanan perdagangan berbasis aturan akan secara langsung merugikan kepentingan nasional Jepang (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2020).

Persepsi ini mendorong para pembuat kebijakan untuk melihat stabilitas regional bukan hanya sebagai keinginan, melainkan sebagai keharusan strategis. Mereka percaya bahwa, sebagai kekuatan ekonomi terkemuka di kawasan, Jepang harus berperan aktif dalam memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara damai dan bahwa lingkungan ekonomi tetap kondusif untuk pertumbuhan. Contoh paling jelas dari persepsi ini adalah dorongan proaktif Jepang untuk menjaga kestabilan kawasan saat ketegangan antara dua mitra dagang utamanya terjadi, bahkan jika Jepang bukan pihak langsung dalam sengketa tersebut. Misalnya, jika ada ketegangan perdagangan atau sengketa maritim yang melibatkan Tiongkok dan salah satu negara ASEAN yang merupakan mitra dagang penting bagi Jepang,

Jepang akan cenderung mencari cara untuk memfasilitasi dialog atau menawarkan solusi. Ini bukan sekadar altruisme, ini adalah langkah strategis untuk melindungi rantai pasokan Jepang, investasi luar negerinya di kedua belah pihak, dan akses pasarnya. Dengan menjaga stabilitas, Jepang pada dasarnya melindungi "jalur kehidupan" ekonominya sendiri (Strangio 2025).

Persepsi para pembuat kebijakan tentang Jepang sebagai "*middle power*" yang berpengaruh di bidang keamanan (dengan batasan militer) juga membentuk orientasi internasional mereka ke arah diplomasi multilateral dan kepemimpinan berbasis norma. Mereka memahami bahwa Jepang tidak bisa bergantung pada kekuatan militer ofensif untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan luar negerinya. Sebaliknya, mereka harus mengandalkan kekuatan ekonomi, "*soft power*", dan kapasitas untuk memfasilitasi dialog dan membangun konsensus (Hynd and Wilkins 2023).

Pandangan ini mendorong Jepang untuk secara aktif memperjuangkan tatanan internasional yang berlandaskan aturan, menghormati hukum laut internasional, dan mendukung penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai. Mereka melihat bahwa dengan mempromosikan norma-norma ini secara global, Jepang dapat menciptakan lingkungan yang lebih dapat diprediksi dan aman bagi dirinya sendiri. Keterlibatan aktif Jepang dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, G7, G20, dan forum-forum regional lainnya adalah manifestasi langsung dari persepsi ini. Mereka menilai bahwa partisipasi Jepang dalam menyelesaikan isu-isu global dan regional seperti perubahan iklim dan non-proliferasi nuklir akan memperluas pengaruhnya dan menjamin keterwakilan kepentingannya dalam pembentukan norma internasional. Ini adalah pendekatan pragmatis untuk meningkatkan

keamanan nasional dan kemakmuran tanpa perlu mengandalkan kekuatan militer yang tidak dimiliki atau tidak ingin diproyeksikan secara ofensif (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2020).

BAB 3

PENGARUH *ALTER ROLE PRESCRIPTIONS* DAN *POLICY MAKERS* *NATIONAL ROLE CONCEPTION* DALAM KEBIJAKAN JEPANG

3.1. Alter Role Prescription

Alter Role Prescription adalah konsep dalam hubungan internasional yang merujuk pada peran yang diharapkan atau ditetapkan oleh aktor eksternal terhadap suatu negara dalam sistem global. Ekspektasi ini dapat berasal dari negara lain, organisasi global, aliansi, dan kelompok non-negara yang memiliki kepentingan tertentu dalam dinamika global. Peran yang ditetapkan oleh pihak eksternal ini seringkali mempengaruhi kebijakan luar negeri dan strategi suatu negara dalam berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, dan keamanan (Holsti 1970).

Ekspektasi terhadap peran suatu negara dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik secara formal maupun informal. Secara formal, peran tersebut dapat ditetapkan melalui perjanjian internasional, kesepakatan diplomatik, atau resolusi organisasi global seperti perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan *world trade organization* (WTO). Secara informal, harapan eksternal dapat dibentuk melalui tekanan politik, opini publik internasional, atau norma yang berkembang dalam komunitas global. Dengan demikian, meskipun suatu negara memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan kebijakan luar negerinya, tekanan eksternal tetap menjadi faktor yang signifikan dalam membentuk keputusan strategisnya (Holsti 1970).

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi ekspektasi eksternal terhadap peran suatu negara adalah posisi dan kekuatannya dalam sistem internasional. Negara-negara besar dengan pengaruh ekonomi dan militer yang kuat, seperti

Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa, seringkali diharapkan untuk memimpin dalam isu-isu global, seperti keamanan internasional, perubahan iklim, dan stabilitas ekonomi. Sebaliknya, negara-negara kecil atau berkembang seringkali ditempatkan dalam peran yang lebih terbatas, seperti menjadi mitra dagang, pemasok sumber daya, atau sekadar mengikuti kebijakan negara-negara yang lebih berpengaruh (Holsti 1970)

3.1.1 System Structure

Struktur sistem di kawasan Asia Timur saat ini ditandai dengan multipolaritas kekuatan dan tingginya tingkat interdependensi ekonomi, memunculkan serangkaian harapan peran (*alter roles prescription*) terhadap Jepang dalam konflik perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Kawasan ini dihuni oleh beberapa negara besar dengan kapasitas ekonomi, militer, dan diplomatik yang signifikan, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, serta pengaruh eksternal kuat dari Amerika Serikat. Tiongkok menonjol sebagai kekuatan yang berkembang pesat dengan pengaruh ekonomi dan militer yang terus meningkat, sementara Jepang tetap menjadi aktor utama dengan kekuatan ekonomi dan posisi strategis dalam berbagai aliansi internasional (Chong 2018).

Multipolaritas di Asia Timur juga tercermin dalam struktur kerjasama dan persaingan yang simultan antar negara-negara utama. Forum-forum multilateral seperti ASEAN Plus Three, East Asia Summit, Indo-Pacific dan APEC menjadi wadah bagi negara-negara di kawasan untuk menavigasi perbedaan kepentingan dan membangun konsensus, meskipun seringkali diliputi oleh persaingan strategis, terutama antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Jepang, dengan

kebijakan luar negeri yang cenderung pro-stabilitas dan berbasis pada aturan internasional (Wilkins 2024).

Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menciptakan dinamika kompleks yang penuh ketegangan di kawasan Asia timur, terutama dalam aspek militer, diplomatik, dan ekonomi. Ketegangan ini muncul akibat meningkatnya saling curiga, kompetisi dalam pengaruh geopolitik, serta kebijakan ekonomi proteksionis dan rivalitas teknologi antara kedua negara. Perang dagang yang dimulai sejak 2018 memperlihatkan bagaimana tarif impor, pembatasan ekspor teknologi, dan langkah-langkah retaliasi dapat berdampak sistemik terhadap rantai pasok global dan kestabilan pasar internasional (Thalia 2024).

Meskipun tidak memiliki kapabilitas militer sebesar Amerika Serikat atau Tiongkok, Jepang aktif menggunakan kekuatan normatif dan ekonomi untuk memengaruhi lingkungan strategis global. Perilaku Jepang tercermin dalam komitmennya terhadap strategi *free and open indo-pacific* (FOIP) di mana Jepang mendorong terbentuknya kawasan yang terbuka, inklusif, dan berbasis pada supremasi hukum tanpa mengecualikan aktor manapun, termasuk Tiongkok (Wahyuni 2024).

Di sisi lain, Jepang juga memperkuat hubungan strategisnya dengan Amerika Serikat, India, Australia, dan (*Association of Southeast Asia Nations*) ASEAN dalam kerangka kerjasama ekonomi, keamanan maritim, dan pembangunan infrastruktur. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Jepang mengandalkan diplomasi ekonomi dan soft power, termasuk melalui bantuan pembangunan dan kepemimpinan dalam isu global seperti perubahan iklim dan tata kelola teknologi. Alih-alih mengandalkan kekuatan

koersif, Jepang menunjukkan preferensi pada legitimasi normatif dan diplomasi multilateral, yang menjadikannya sebagai aktor yang berperan sebagai penyeimbang sekaligus mediator dalam dinamika global, termasuk dalam ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok (Choudhury 2024).

Strategi FOIP yang diusung Jepang sejak era Perdana Menteri Shinzo Abe dirancang sebagai visi geopolitik yang bersifat inklusif, bukan aliansi eksklusif untuk menghadapi Tiongkok. FOIP menekankan prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, kebebasan navigasi, perdagangan bebas, dan konektivitas kawasan, serta mendorong tatanan regional yang stabil dan berbasis aturan. Jepang secara tegas menyatakan bahwa FOIP terbuka bagi semua negara yang bersedia menghormati norma internasional. Pendekatan ini mencerminkan karakter diplomasi Jepang yang tidak konfrontatif, melainkan mengutamakan keterlibatan (*engagement*) dan pembangunan kepercayaan. Dalam praktiknya, Jepang menggandeng berbagai negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Kepulauan Pasifik melalui kerjasama pembangunan infrastruktur, pelatihan keamanan maritim, dan bantuan kemanusiaan, tanpa memaksakan standar ideologis tertentu (Satake and Sahashi 2021).

Jepang juga aktif berkoordinasi dengan negara-negara mitra seperti India dan Australia dalam bentuk *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad), namun tetap menekankan bahwa Quad bukanlah pakta militer melainkan forum koordinatif terbuka. Bahkan dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Jepang, disebutkan bahwa FOIP adalah “visi bersama yang terbuka bagi semua pihak,” bukan upaya isolasi terhadap kekuatan besar seperti Tiongkok. Strategi ini menunjukkan bagaimana Jepang berusaha membangun kawasan Indo-Pasifik

yang stabil dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai liberal ke dalam kerja sama yang pragmatis dan adaptif terhadap kompleksitas politik kawasan, menjadikan FOIP bukan sebagai alat eksklusif, melainkan sebagai ruang kolaborasi yang luas dan fleksibel (Japan Ministry of Defense n.d.).

3.1.2 System Wide Value

Menurut pandangan K.J. Holsti, sistem internasional modern memiliki nilai-nilai sistemik (*system-wide values*) yang menekankan pada pentingnya pembangunan ekonomi, industrialisasi, dan modernisasi sebagai tolok ukur status suatu negara di dunia. Nilai-nilai ini melampaui kepentingan nasional semata dan menjadi pedoman bersama yang memengaruhi arah kebijakan luar negeri berbagai negara. Dalam konteks perang dagang Amerika Serikat–Tiongkok, Jepang menyesuaikan kebijakan luar negerinya dengan nilai sistemik tersebut melalui komitmennya terhadap perdagangan bebas, stabilitas ekonomi global, dan peningkatan kapasitas industri nasional (Holsti 1981, 381).

Perdagangan bebas adalah fondasi utama dari sistem ekonomi internasional modern, mendorong negara-negara untuk meniadakan hambatan seperti tarif dan kuota dalam pertukaran barang dan jasa. Konsep ini berlandaskan pada prinsip keunggulan komparatif, yang mendorong tiap negara untuk fokus memproduksi barang yang dapat mereka hasilkan dengan paling efisien. Dengan cara ini, distribusi sumber daya secara global menjadi lebih optimal dan konsumen diseluruh dunia mendapat akses terhadap lebih banyak pilihan barang dengan harga lebih terjangkau. Sebaliknya, proteksionisme adalah kebijakan yang memberlakukan hambatan perdagangan untuk melindungi industri domestik, meskipun seringkali berujung pada inefisiensi, harga yang lebih tinggi bagi

konsumen, dan risiko perang dagang. Tatanan ekonomi internasional yang saat ini berlaku, sebagian besar dibangun setelah Perang Dunia II, Tatanan tersebut diatur oleh organisasi seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia, yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan yang adil dan transparan (Prabandari 2025).

Sebagai salah satu negara yang ekonominya terbesar di dunia, Jepang sangat bergantung pada ekspor dan impor, sehingga Jepang mendukung perdagangan bebas dan menentang proteksionisme. Dukungan ini bukan sekadar omongan belaka, Jepang membuktikannya melalui partisipasi aktif dalam inisiatif perdagangan regional dan multilateral. Salah satu contoh utamanya adalah *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP), setelah Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian awal *Trans-Pacific Partnership* (TPP), Jepang mengambil alih kepemimpinan untuk memastikan CPTPP tetap berjalan, menunjukkan komitmennya terhadap integrasi ekonomi dan standar perdagangan yang tinggi di kawasan Pasifik (Mcgill and Yamaguchi 2025).

Selain CPTPP, Jepang juga merupakan anggota dari *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), sebuah perjanjian perdagangan bebas antara 15 negara di Asia-Pasifik yang kini menjadi blok perdagangan terbesar di dunia. Meskipun RCEP mungkin tidak seambisius CPTPP dalam cakupannya, Jepang melihatnya sebagai langkah penting untuk lebih mengintegrasikan ekonomi di Asia dan memperkuat stabilitas regional. Keikutsertaan Jepang dalam RCEP menggarisbawahi tekadnya untuk memperdalam hubungan perdagangan dengan ekonomi-ekonomi utama di Asia dan sekitarnya. Di tingkat global, Jepang secara konsisten mendukung reformasi

World Trade Organization (WTO). Dengan kesadaran bahwa WTO menghadapi tantangan serius seperti kebuntuan negosiasi dan kelumpuhan sistem penyelesaian sengketa, Jepang aktif mendorong revitalisasi fungsi negosiasi WTO, memperkuat transparansi, dan mengatasi isu-isu baru seperti e-commerce (Oba 2025).

Secara fundamental, komitmen Jepang terhadap "*rules-based order*" atau tatanan berbasis aturan adalah pilar kebijakan luar negeri dan ekonominya. Ini berarti Jepang menjunjung tinggi sistem internasional yang diatur oleh hukum internasional, perjanjian, dan norma-norma yang disepakati, bukan oleh kekuatan sepihak. Sebagai negara kepulauan dengan sumber daya terbatas yang sangat bergantung pada stabilitas perdagangan global, tatanan yang transparan dan prediktabel ini sangat vital bagi keamanan dan kemakmuran Jepang. Dukungannya terhadap multilateralisme dan penolakannya terhadap unilateralisme atau koersi adalah bukti dari keyakinannya bahwa kerja sama dan kepatuhan terhadap aturan adalah kunci untuk menghadapi tantangan global dan memastikan masa depan ekonomi yang stabil bagi semua (Government of Japan and the World Trade Organization Secretariat n.d.).

3.1.3 General Legal Principles

Prinsip *Non-Discrimination* merupakan dasar utama dalam aturan perdagangan bebas, terutama dalam sistem WTO. Prinsip ini memastikan bahwa negara anggota tidak memberikan perlakuan diskriminatif terhadap mitra dagang tertentu dan tetap menerapkan kebijakan perdagangan yang adil. Dua elemen utama dari prinsip ini adalah yaitu pertama *most-favored nation principle* yang mengharuskan negara anggota WTO untuk memberikan perlakuan perdagangan yang sama kepada semua mitra dagangnya. Jika suatu negara memberlakukan

tarif rendah atau memberikan keuntungan perdagangan kepada satu negara, maka perlakuan yang sama wajib diberikan kepada seluruh anggota WTO sesuai prinsip non-diskriminasi. Kedua *national treatment principle* yaitu setelah suatu produk asing memasuki pasar domestik, produk tersebut harus diperlakukan sama dengan produk lokal dalam hal pajak, regulasi, dan kebijakan lainnya. Prinsip ini mencegah diskriminasi terhadap produk impor setelah mereka masuk ke pasar domestik (WTO Trade and Environment n.d.).

Prinsip *fair trade* memastikan bahwa perdagangan internasional berjalan dengan adil dan seimbang, tanpa adanya praktik proteksionisme yang berlebihan atau tindakan yang merugikan negara lain. Beberapa elemen utama dari prinsip ini meliputi mencegah proteksionisme yang berlebihan, Negara boleh melindungi industri domestiknya, tetapi tidak boleh secara berlebihan menghambat perdagangan internasional melalui tarif tinggi atau subsidi yang merugikan mitra dagang. Mencegah dumping dan subsidi tidak adil, dumping terjadi ketika suatu negara menjual produknya di luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga domestiknya untuk menguasai pasar. WTO mengatur anti-dumping untuk menjaga persaingan yang sehat. Subsidi berlebihan kepada industri domestik bisa mengganggu keseimbangan perdagangan. WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa untuk menangani kasus ini. Serta WTO memiliki sistem penyelesaian sengketa untuk menengahi konflik perdagangan antara negara anggota (Snatika n.d.).

Prinsip *good faith* menekankan bahwa negara harus bernegosiasi dengan itikad baik dalam menyelesaikan konflik perdagangan dan menjalankan kewajibannya dalam organisasi perdagangan internasional seperti WTO, G20, dan

APEC. Dalam praktiknya, prinsip ini mengharuskan negara untuk bernegosiasi secara jujur dan transparan tanpa melakukan manipulasi yang merugikan pihak lain. Misalnya, kegagalan negosiasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam perang dagang sering kali terjadi karena kedua pihak saling menuduh tidak berunding dengan itikad baik (Mitchell 2006).

Sementara itu, prinsip *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa setiap perjanjian internasional wajib dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang terlibat. Dalam konteks perdagangan global, negara yang telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas atau menjadi anggota WTO wajib mematuhi komitmen yang telah disepakati. Jepang, misalnya, tetap berkomitmen terhadap CPTPP meskipun Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian tersebut, menunjukkan bahwa prinsip ini menjadi dasar dalam menjaga stabilitas sistem perdagangan (Tsvety 2024).

Jepang secara konsisten menerapkan prinsip *Good Faith* dan *Pacta Sunt Servanda* dalam kebijakan luar negerinya, terutama dalam perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar dalam CPTPP setelah keluarnya Amerika Serikat, Jepang memastikan bahwa negosiasi tetap berjalan dengan itikad baik dan bekerja sama dengan negara anggota lainnya untuk menyusun ulang perjanjian tanpa harus mengubah prinsip dasarnya. Dengan tetap mematuhi perjanjian ini, Jepang menunjukkan komitmennya terhadap *Pacta Sunt Servanda*, dimana kesepakatan perdagangan yang telah dibuat harus dihormati dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab (ASEAN Secretariat n.d)..

3.1.4 Treaty Commitments

Jepang memiliki beberapa perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat, seperti perjanjian militer yang dimulai pada hari penandatanganan perjanjian damai dengan Sekutu, Jepang berada dalam posisi tanpa sarana yang efektif untuk melaksanakan hak membela diri yang melekat padanya, karena senjata-senjatanya telah dilucuti. Dalam kondisi tersebut, Jepang menghadapi ancaman dari militerisme yang belum sepenuhnya disingkirkan dari dunia. Oleh karena itu, Jepang menginginkan agar perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat dapat mulai berlaku bersamaan dengan perjanjian perdamaian antara kedua negara (United States and Japan n.d.).

Perjanjian tersebut mengakui bahwa Jepang sebagai negara berdaulat memiliki hak untuk mengadakan pengaturan keamanan kolektif, sebagaimana ditegaskan pula dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa, yang menjamin hak atas pembelaan diri secara individual maupun kolektif. Dalam menjalankan hak tersebut, Jepang meminta agar Amerika Serikat untuk sementara waktu menempatkan angkatan bersenjata di dan sekitar wilayah Jepang guna mencegah kemungkinan serangan bersenjata. Amerika Serikat menyatakan kesediaannya untuk menempatkan pasukannya demi menjaga perdamaian dan keamanan, dengan harapan bahwa Jepang secara bertahap akan mengambil tanggung jawab lebih besar atas pertahanan nasionalnya sendiri, tanpa membangun kekuatan militer ofensif yang bertentangan dengan prinsip perdamaian dalam piagam PBB (Ministry of Foreign Affairs of Japan n.d.).

Jepang juga menyetujui bahwa segala bentuk pemberian hak pangkalan militer, kekuasaan, atau akses terhadap pasukan darat, laut, dan udara kepada

negara ketiga harus melalui persetujuan terlebih dahulu dari Amerika Serikat. Ketentuan mengenai penempatan pasukan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian administratif antara kedua pemerintah. Perjanjian ini akan berakhir apabila, menurut pandangan kedua negara, telah berlaku suatu sistem keamanan alternatif melalui PBB atau mekanisme kolektif lain yang dapat menjamin perdamaian dan keamanan internasional di wilayah Jepang (Ministry of defense n.d.).

Perjanjian mineral atau *minerals agreement* juga merupakan salah satu perjanjian Amerika Serikat dengan Jepang dalam sektor perekonomian. Perjanjian ini disahkan pada 28 Maret 2023 dengan didasari oleh perjanjian perdagangan Amerika Serikat dan Jepang tahun 2019. Perjanjian ini adalah bentuk kesepakatan kedua negara terhadap sektor mineral penting untuk memfasilitasi perdagangan, mempromosikan persaingan yang adil, memajukan standar ketenagakerjaan dan lingkungan yang kuat. Duta besar Katherine Tai mengatakan (United States Trade Representative n.d.).

"perjanjian ini adalah bukti komitmen presiden Biden untuk membangun rantai pasokan yang tanggung dan aman. Jepang adalah salah satu mitra dagang yang berharga dan perjanjian ini adalah momen yang baik karena Amerika Serikat terus bekerja sama dengan sekutu dan mitra kami untuk memperkuat pasokan mineral. Termasuk melalui undang-undang pengurangan inflasi" (United States Trade Representative n.d.).

Perjanjian ini menetapkan beberapa komitmen seperti tidak mengenakan bea ekspor terhadap mineral penting, langkah-langkah yang mempromosikan pendekatan ekonomi sirkular dan efisiensi sumber daya yang lebih baik untuk mengurangi permintaan dan dampak lingkungan dari ekstraksi bahan mentah.

Disisi lain, Jepang juga mempunyai Perjanjian dengan Tiongkok. Perjanjian perdamaian dan persahabatan antara Jepang dan Tiongkok (*Héqíng Yǒuhǎo Tiáoyuē* dalam bahasa Mandarin, *Nicchū Heiwa Yūkō Jōyaku* dalam bahasa Jepang). yang ditandatangani pada tahun 1978, menjadi landasan krusial dalam menormalisasi serta mengembangkan hubungan bilateral kedua negara pasca perang dunia II. Perjanjian ini meletakkan prinsip-prinsip fundamental seperti saling menghormati kedaulatan, tidak saling menyerang, kesetaraan, hidup berdampingan secara damai, dan secara eksplisit menolak hegemoni di kawasan Asia-Pasifik. Selain itu, perjanjian ini mendorong pengembangan hubungan ekonomi dan budaya, serta menekankan penyelesaian sengketa secara damai. Sebagai dokumen yang berlaku tanpa batas waktu, Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan tahun 1978 telah memainkan peran signifikan dalam memfasilitasi peningkatan kerja sama ekonomi, pertukaran budaya, dan berkontribusi pada stabilitas regional, meskipun isu-isu sensitif seperti sejarah masa lalu dan sengketa wilayah tetap menjadi tantangan dalam dinamika hubungan kedua negara (Ministry of Foreign Affairs of Japan n.d.).

Perjanjian perdagangan antara Jepang dan Tiongkok yang ditandatangani pada tahun 1974 secara resmi bernama Perjanjian Perdagangan Jepang dan Tiongkok (*Nicchū Bōeki Kyōtei*). Sebagai perjanjian bilateral pertama setelah normalisasi hubungan diplomatik kedua negara, perjanjian ini bertujuan untuk membangun fondasi yang kokoh bagi perdagangan jangka panjang. Poin-poin krusial dalam perjanjian ini mencakup pemberian status most favored nation untuk tarif dan bea cukai, pengaturan mekanisme pembayaran bilateral, promosi aktivitas perdagangan melalui pameran dan pertukaran informasi, serta

pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa dagang. Perjanjian tahun 1974 ini terbukti menjadi katalisator penting bagi pertumbuhan pesat perdagangan antara Jepang dan Tiongkok, membuka jalan bagi kerja sama ekonomi yang lebih mendalam di masa depan (Ministry of Foreign Affairs of Japan n.d.).

Keanggotaan Jepang, Tiongkok, dan Amerika Serikat dalam berbagai organisasi internasional dan keterikatan mereka pada perjanjian multilateral, seperti WTO, memberikan landasan yang kokoh bagi peran mediasi Jepang. Keanggotaan ini membawa implikasi berupa penerimaan norma dan aturan bersama, akses ke forum diskusi, potensi pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa, serta pembentukan jaringan dan reputasi internasional. Lebih lanjut, perjanjian multilateral menciptakan kewajiban hukum yang mengikat, menetapkan aturan main dalam perdagangan internasional, dan mencerminkan konsensus global. Dalam perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, Jepang dapat secara strategis mengacu pada prinsip dan aturan yang disepakati dalam perjanjian ini, mengingatkan pihak-pihak yang berselisih akan kewajiban bersama mereka, mengusulkan solusi yang sesuai dengan norma internasional, dan memanfaatkan pengalamannya dalam forum multilateral untuk menjaga stabilitas kawasan ditengah perang dagang (World Trade Organization n.d.).

3.1.5 World Opinion

Pandangan negara-negara lain terhadap posisi Jepang dalam tatanan ekonomi dan geopolitik global sangat beragam, namun umumnya positif. Jepang dipandang sebagai mitra yang stabil dan dapat diandalkan, menjunjung tinggi hukum internasional, demokrasi, dan prinsip pasar bebas. Peran aktif Jepang dalam mendorong perjanjian seperti CPTPP dan RCEP, serta upayanya

mereformasi WTO, sangat diapresiasi oleh banyak negara yang juga menginginkan sistem perdagangan terbuka dan berbasis aturan. Selain itu, sebagai kekuatan ekonomi yang inovatif, Jepang seringkali menjadi sumber investasi, bantuan pembangunan, dan transfer teknologi bagi negara-negara berkembang (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2022).

Negara-negara Asia Tenggara, khususnya anggota ASEAN, secara umum menyambut positif peran Jepang dalam menjaga stabilitas kawasan. Jepang dianggap sebagai mitra yang dapat dipercaya dan memiliki pendekatan diplomatik yang halus serta menghormati prinsip-prinsip hukum internasional. Kebijakan Jepang yang menekankan pada tatanan berbasis aturan dan kerja sama ekonomi telah meningkatkan kepercayaan negara-negara ASEAN terhadap Jepang. Survei oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute menunjukkan peningkatan kepercayaan terhadap kepemimpinan Jepang dalam menjaga tatanan berbasis aturan di kawasan, dari 7,7% pada 2022 menjadi 8,6% pada 2023 (South East Asia Public Policy Institute 2025).

3.2 Policy Makers National Role Conception

Policy Makers National Role Conception adalah konsep dalam hubungan internasional yang merujuk pada persepsi dan pemahaman para pembuat kebijakan suatu negara mengenai peran apa yang seharusnya dijalankan oleh negara tersebut dalam sistem internasional. Menurut Holsti, konsep ini mencakup pandangan internal elite politik dan diplomatik tentang jenis keputusan, tindakan, tanggung jawab, serta fungsi yang pantas dilakukan oleh negara mereka dalam kaitannya dengan aktor-aktor global lainnya. Dengan kata lain, *National Role Conception* merupakan “peran diri” (*self-ascribed role*) yang dibentuk

berdasarkan interpretasi para pemimpin terhadap sejarah, identitas nasional, nilai-nilai politik, kondisi domestik, serta posisi negara mereka dalam struktur internasional (Holsti 1970).

Peran yang dikonstruksi oleh pembuat kebijakan ini bersifat subjektif dan dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, bahkan dalam waktu yang berbeda pada negara yang sama, tergantung pada siapa yang memegang kekuasaan. Konsepsi ini sering tercermin dalam pernyataan resmi pemerintah, strategi diplomasi, kebijakan luar negeri, dan sikap negara dalam berbagai forum internasional. Meskipun konsep ini dibentuk secara internal, ia tidak sepenuhnya terlepas dari konteks eksternal. Tekanan internasional, dinamika geopolitik, dan harapan global tetap dapat mempengaruhi bagaimana pembuat kebijakan menafsirkan dan membentuk *policy makers national role conception* mereka. Namun, yang membedakan *policy makers national role conception* dari *Alter Role Prescription* adalah bahwa *policy makers national role conception* berangkat dari dalam, dari persepsi elite domestik tentang apa yang “seharusnya” menjadi peran negaranya, bukan dari tuntutan pihak luar (Holsti 1970)

3.2.1 Resources Of Sstate Capabilities

Jepang memiliki basis industri dan teknologi yang sangat kuat. Negara ini dikenal sebagai pemimpin global dalam bidang otomotif, elektronik, dan semikonduktor, yang menjadi tulang punggung ekspor nasional. Selain itu, Jepang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dengan tingkat pendidikan dan produktivitas yang unggul, serta kapasitas penelitian dan pengembangan (R&D) yang besar. Dukungan institusi ekonomi yang stabil, seperti kebijakan fiskal yang hati-hati, sistem keuangan yang kuat, dan cadangan devisa yang besar,

juga menjadi modal penting dalam menjaga daya tahan ekonomi Jepang terhadap dampak eksternal dari perang dagang (Statistics Bureau of Japan 2024).

Sementara itu, capabilities Jepang terlihat dari kemampuannya mengelola sumber daya tersebut secara efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi internasional. Jepang mampu menerapkan diplomasi ekonomi yang seimbang dengan kedua pihak yang berkonflik. Meskipun menjadi sekutu utama Amerika Serikat, Jepang tetap menjaga hubungan ekonomi yang erat dengan Tiongkok, yang merupakan mitra dagang terbesar bagi Jepang. Pendekatan ini mencerminkan kemampuan diplomatik Jepang dalam menempatkan diri sebagai aktor moderat dan penstabil di kawasan Asia Timur (EAFeditors 2025).

Selain kapabilitas diplomatik, Jepang juga menunjukkan kemampuan adaptif dalam restrukturisasi rantai pasok global. Ketika perang dagang memicu ketegangan tarif dan gangguan pasokan, Jepang memperluas pasar ekspor ke negara-negara Asia Tenggara dan memperkuat kerjasama ekonomi melalui perjanjian multilateral. Strategi ini mencerminkan kemampuan Jepang dalam memanfaatkan struktur ekonomi regional untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan dan mengurangi ketergantungan pada dua raksasa ekonomi dunia (Frishanti 2024).

Gabungan antara resources yang kuat dan capabilities yang adaptif menjadikan Jepang mampu menghadapi tekanan yang timbul dari perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Kekuatan ekonomi dan teknologi memberikan landasan bagi stabilitas nasional, sementara kemampuan diplomatik dan kebijakan ekonomi fleksibel memungkinkan Jepang memainkan peran strategis sebagai penjaga stabilitas di tengah ketegangan global. Melalui strategi ini, Jepang tidak

hanya berhasil melindungi kepentingan ekonominya, tetapi juga memperkuat perannya sebagai kekuatan penstabil dalam tatanan perdagangan internasional (Ministry of Foreign Affairs of Japan n.d.).

3.2.2 Socio-Economic Needs

Jepang merupakan negara dengan ekonomi yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, khususnya dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Ketergantungan ini menjadikan Jepang rentan terhadap gejolak perdagangan global, seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi, rantai pasokan perusahaan, dan pertumbuhan ekspor Jepang. Pada tahun 2020, Tiongkok menyumbang sekitar 26% dari total impor Jepang, menjadikannya mitra dagang terbesar Jepang, diikuti oleh Amerika Serikat sebesar 19% dan Jerman 11%. Ketergantungan ini meliputi berbagai sektor, dari pasokan bahan mentah hingga produk akhir, seperti elektronik dan otomotif. Jika terjadi gangguan pada impor dari Tiongkok, seperti yang diperkirakan oleh Profesor Yasuyuki Todo dari Universitas Waseda, Jepang dapat kehilangan produksi senilai 53 triliun yen, setara dengan sekitar 10% dari PDB-nya (Xinhua 2023).

Perang dagang membawa dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Jepang. Ekspor Jepang mengalami penurunan, terutama dalam pengiriman barang elektronik dan peralatan semikonduktor ke Tiongkok, akibat perselisihan perdagangan dan berkurangnya permintaan smartphone. Surplus perdagangan Jepang anjlok sekitar 90% pada April 2019, terutama disebabkan penurunan ekspor produk terkait cip ke Tiongkok. Perusahaan multinasional Jepang seperti Mitsubishi corporation dan Panasonic corporation juga terdampak,

dengan penurunan penjualan dan laba operasi akibat perlambatan ekonomi Tiongkok dan ketidakpastian iklim bisnis (Reuters 2019).

Tabel 1 Data ekspor impor tahunan Jepang

Tahun	Total ekspor (JPY Miliar)	Total impor (JPY Miliar)
2019	705.6	721.1
2020	641.3	635.5
2021	756	769
2022	746.8	897
2023	717.3	785.6
2024	707.4	742.9

Sumber: (Santander 2025).

Kolom tersebut menunjukkan bahwa setelah penurunan pada tahun 2020, kemungkinan karena pandemi, perdagangan Jepang mengalami pemulihan pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, impor meningkat secara signifikan, menyebabkan defisit perdagangan yang besar. Pada tahun 2023, meskipun ekspor sedikit menurun, impor mengalami penurunan yang lebih besar, sehingga memperkecil defisit perdagangan. Data awal untuk tahun 2024 menunjukkan peningkatan substansial dalam ekspor dan pengurangan defisit perdagangan (Santander 2025).

Perbandingan dengan tren global menunjukkan bahwa nilai perdagangan barang dagangan dunia mengalami penurunan sebesar 4,9% pada tahun 2023. Penurunan defisit perdagangan Jepang pada tahun yang sama, yang didorong oleh penurunan impor, menunjukkan bahwa kinerja perdagangan Jepang mungkin

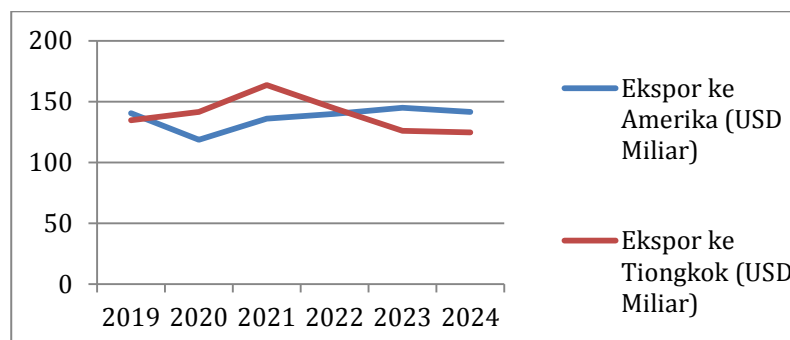
berbeda dari tren global secara keseluruhan. Data dari kementerian ekonomi, perdagangan dan industri atau METI, juga mengindikasikan bahwa neraca perdagangan Jepang mengalami defisit sebesar 6.629,0 miliar yen pada tahun 2023, menyempit sebesar 57,9% dari defisit tahun sebelumnya. Penurunan impor, terutama bahan bakar mineral, berkontribusi signifikan terhadap penyempitan defisit ini (JETRO n.d.).

Tabel 2 Data ekspor dengan Amerika dan Tiongkok

Tahun	Ekspor ke Amerika (USD Miliar)	Ekspor ke Tiongkok (USD Miliar)
2019	140.5	134.7
2020	118.7	141.4
2021	135.9	163.7
2022	139.8	144.5
2023	145	126
2024	141.5	124.6

Sumber: (Santander 2025).

Grafik 1 Data ekspor dengan Amerika dan Tiongkok



Sumber: (Santander 2025).

Data pada tabel dan grafik menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok tetap menjadi dua mitra ekspor utama Jepang sepanjang periode 2019 hingga 2024. Meskipun begitu, tren ekspor menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Tahun 2020 mencatat penurunan tajam ekspor ke Amerika Serikat (dari USD 140,5 miliar menjadi USD 118,7 miliar), kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi global. Sebaliknya, ekspor ke Tiongkok justru mengalami kenaikan menjadi USD 141,4 miliar pada tahun tersebut (Santander 2025).

Pada 2021, ekspor Jepang ke kedua negara mengalami pemulihan, dengan peningkatan signifikan ke Tiongkok yang mencapai USD 163,7 miliar angka tertinggi selama periode ini. Namun pada 2022, ekspor ke Tiongkok mulai menurun menjadi USD 144,5 miliar, sementara ekspor ke Amerika Serikat tetap tumbuh mencapai USD 139,8 miliar. Tren ini berlanjut ke tahun 2023, di mana ekspor ke Tiongkok turun tajam ke USD 126 miliar, sementara ekspor ke Amerika Serikat meningkat ke USD 145 miliar. Data awal tahun 2024 menunjukkan bahwa ekspor Jepang ke Amerika Serikat sedikit menurun menjadi USD 141,5 miliar, namun masih tergolong tinggi. Sementara itu, ekspor ke Tiongkok juga sedikit turun ke USD 124,6 miliar. Ini menunjukkan adanya potensi pengaruh dari dinamika perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sektor otomotif, elektronik, dan mesin masih mendominasi ekspor Jepang (Santander 2025).

Berdasarkan data *Japan External Trade Organization* atau sering disebut JETRO, terdapat kecenderungan persaingan yang meningkat di sektor mesin dan elektronik akibat kerja sama Tiongkok dan Amerika Serikat. Meski demikian,

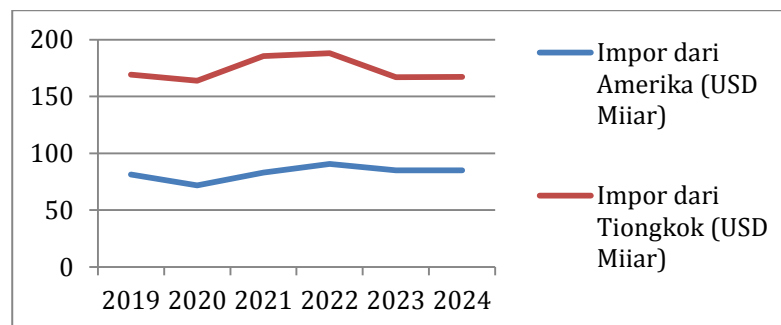
Jepang menunjukkan peningkatan ekspor peralatan manufaktur semikonduktor pada tahun 2024, khususnya ke Tiongkok dan negara-negara Asia lainnya. Hal ini mencerminkan upaya global untuk memperkuat rantai pasok dalam negeri sebagai respons terhadap ketegangan perdagangan (JETRO n.d.).

Tabel 3 Data impor dengan Amerika dan Tiongkok

Tahun	impor dari Amerika (USD Miliar)	impor dari Tiongkok (USD Miliar)
2019	81.4	169.3
2020	71.7	163.8
2021	82.9	185.6
2022	90.6	188.8
2023	85	167
2024	84.9	167.1

Sumber: (Santander 2025).

Grafik 2 Data impor dengan Amerika dan Tiongkok



Sumber: (Santander 2025).

Pada tahun 2020, impor Jepang dari Amerika Serikat menurun menjadi USD 71,7 miliar dari USD 81,4 miliar di tahun sebelumnya, kemungkinan besar

akibat gangguan pasokan global. Sebaliknya, impor dari Tiongkok juga sedikit turun dari USD 169,3 miliar menjadi USD 163,8 miliar. Tahun 2021 mencatat lonjakan signifikan dalam impor dari kedua negara, terutama dari Tiongkok yang naik menjadi USD 185,6 miliar dan dari Amerika Serikat ke USD 82,9 miliar. Kenaikan ini berlanjut pada 2022, dengan impor dari Tiongkok mencapai puncaknya di USD 188,8 miliar dan dari Amerika Serikat sebesar USD 90,6 miliar (Santander 2025).

Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan impor dari kedua negara. Impor dari Amerika Serikat menurun menjadi USD 85 miliar dan dari Tiongkok turun drastis ke USD 167 miliar. Data awal tahun 2024 menunjukkan bahwa impor dari kedua negara tetap relatif stabil dengan sedikit perubahan USD 84,9 miliar dari Amerika dan USD 167,1 miliar dari Tiongkok. Situasi ini bisa mencerminkan penyesuaian strategi perdagangan Jepang di tengah tantangan geopolitik dan tarif perdagangan (Santander 2025).

Laporan JETRO menyoroti meningkatnya beban pada bisnis karena perluasan kontrol ekspor dan penegakan yang lebih ketat. Perusahaan-perusahaan Jepang yang sangat bergantung pada input dari Tiongkok atau yang mengekspor ke Amerika Serikat mungkin menghadapi tantangan terkait tarif dan ketidakpastian. Meskipun tidak ada informasi spesifik dalam ringkasan mengenai relokasi produksi besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan Jepang, perang dagang kemungkinan mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengevaluasi dan diversifikasi rantai pasokan mereka untuk mengurangi risiko (JETRO n.d.).

Selama perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok terjadi, investasi dari Amerika Serikat ke Jepang mengalami peningkatan signifikan karena banyak

perusahaan Amerika mencari lokasi yang stabil di Asia untuk mengamankan rantai pasokan mereka. Jepang dianggap sebagai negara dengan sistem hukum yang jelas, pasar yang maju, dan stabilitas politik tinggi, sehingga menjadi tujuan menarik bagi investor Amerika. Berdasarkan data Japan External Trade Organization (JETRO), Amerika Serikat merupakan investor terbesar di Jepang dengan nilai stok investasi mencapai sekitar 10,3 triliun yen pada akhir tahun 2022, atau sekitar 22,3 % dari total (*foreign direct investment*) FDI masuk ke Jepang (JETRO 2025). Pada tahun 2023, stok FDI dari Amerika Serikat bahkan meningkat hingga 23,2 % dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap pasar Jepang di tengah ketidakpastian global (JETRO 2025).

Sementara itu, perusahaan-perusahaan Tiongkok juga meningkatkan investasinya ke Jepang selama periode perang dagang untuk menghindari dampak tarif dan pembatasan ekspor dari Amerika Serikat. Berdasarkan laporan JETRO (2024), aliran investasi langsung (*FDI inflow*) dari Tiongkok ke Jepang pada tahun 2023 tumbuh sebesar 103,8 % dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai sekitar 0,2 triliun yen (JETRO 2024). Peningkatan ini terutama terjadi di sektor teknologi informasi, kendaraan listrik, dan *e-commerce*. Fenomena ini menunjukkan bahwa Jepang menjadi tujuan alternatif strategis bagi perusahaan Tiongkok untuk menjaga akses ke pasar Asia Timur dan memperoleh teknologi canggih Jepang, sekaligus memperkuat posisi Jepang sebagai “*zona netral*” yang diuntungkan oleh ketegangan ekonomi antara dua kekuatan besar tersebut.

Ketegangan perdagangan global telah mengganggu rantai pasokan perusahaan-perusahaan Jepang. Banyak perusahaan Jepang yang memiliki

operasi di Tiongkok mengalami kesulitan dalam produksi dan distribusi akibat tarif tinggi dan pembatasan ekspor. Beberapa perusahaan mulai memindahkan operasinya ke beberapa negara di Asia Tenggara untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tiongkok serta menghindari dampak negatif dari perang dagang (Pryanka 2019).

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah berdampak besar terhadap sektor industri Jepang. Ketegangan ini mengganggu aliran komponen dan produk, yang berdampak pada rantai pasokan perusahaan-perusahaan Jepang. Sebagai contoh, Jepang memberlakukan pengetatan aturan ekspor terhadap sejumlah bahan kimia penting yang digunakan dalam produksi cip dan ponsel pintar, sehingga berdampak pada industri telekomunikasi Korea Selatan. Selain itu, Jepang menghadapi tantangan dalam mempertahankan daya saing di sektor-sektor teknologi tinggi di tengah persaingan yang semakin ketat dari negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Untuk mengatasi hal ini, Jepang berusaha untuk beradaptasi dengan fokus pada inovasi di bidang-bidang seperti robotika, kecerdasan buatan, dan teknologi hijau (kumparanBISNIS 2019).

Menyadari dampak negatif dari ketegangan perdagangan global, Jepang mengambil peran aktif dalam meredakan konflik tersebut. Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi dan teknologi, Jepang memiliki posisi strategis untuk mendorong dialog dan mencari solusi yang tidak merugikan kepentingan ekonomi regional. Misalnya, Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan mengadakan dialog ekonomi pada 25 Mei 2024 sebagai upaya meredakan ketegangan di tengah meningkatnya tekanan tarif dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, ketiga negara membahas isu-isu perdagangan dan berkomitmen untuk

memperkuat komunikasi serta meningkatkan kerjasama guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global (Soehandoko 2024).

Melalui Doktrin Fukuda tahun 1977, Jepang menegaskan komitmennya untuk tidak menjadi kekuatan militer, melainkan fokus pada pembangunan hubungan damai dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara. Doktrin ini menjadi dasar bagi kebijakan internasional Jepang yang menitikberatkan pentingnya multilateralisme dan integrasi regional. Dalam menghadapi ketegangan perdagangan, Jepang berupaya menjaga relasi dengan kedua negara tersebut. Langkah ini mencerminkan sikap hati-hati Jepang dalam menyeimbangkan hubungan dengan dua kekuatan global utama tersebut (Murakami and Kiyohara 2025).

3.2.3 National Value

Pembuat kebijakan Jepang kemungkinan besar merumuskan peran nasional Jepang dalam menghadapi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai pelindung kepentingan nasional yang pragmatis, dan pendukung aktif tatanan regional berbasis aturan. Peran ini berakar pada identitas nasional Jepang yang menjunjung tinggi multilateralisme dan kemakmuran regional, serta dibentuk oleh trauma sejarah perang dunia II yang mendorong pendekatan diplomatik dan ekonomi (Lipsy 2020).

Sebagai negara yang sangat bergantung pada perdagangan internasional dan memiliki rantai pasok yang terintegrasi di Asia Timur, Jepang berupaya keras untuk menjaga stabilitas rantai pasok regional dan menghindari polarisasi kekuatan yang dapat merugikan pertumbuhan ekonomi dan keamanan kawasan. Jepang tidak ingin terjebak dalam pilihan yang merugikan antara sekutu

keamanannya Amerika Serikat, dan mitra dagang utamanya Tiongkok. Oleh karena itu, Jepang berhati-hati untuk mempertahankan ruang manuver dan menjaga hubungan yang seimbang dengan kedua negara, sambil meminimalkan dampak negatif perang dagang terhadap ekonominya sendiri dan kawasan secara keseluruhan (Aftoni 2021).

Kemampuan nasional Jepang, yang mencakup kekuatan diplomatik, ekonomi yang signifikan, dan keterlibatan aktif dalam forum multilateral, mendukung aspirasi perannya. Aliansi dengan Amerika Serikat memberikan landasan stabilitas, sementara hubungan ekonomi yang kompleks dengan Tiongkok menuntut pendekatan yang hati-hati. Jepang mengandalkan "soft power" melalui diplomasi dan kerja sama ekonomi, mengingat keterbatasan militernya. Dalam konteks sistem internasional, Jepang melihat perang dagang sebagai ancaman terhadap tatanan berbasis aturan yang menguntungkannya, sekaligus sebagai peluang untuk memainkan peran konstruktif dalam meredakan ketegangan dan mempromosikan solusi damai melalui diplomasi dan pembangunan koalisi dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa di kawasan dan global (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2020).

Jepang memandang dinamika kekuatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dengan perspektif berlapis. Prioritas utama adalah keamanan nasional, mengingat ketergantungan pada aliansi dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya kekuatan militer Tiongkok dan aktivitasnya di kawasan. Namun, Jepang juga terikat secara ekonomi dengan Tiongkok, menciptakan dilema antara keamanan dan kemakmuran. Kekhawatiran terhadap potensi erosi tatanan

internasional berbasis aturan akibat rivalitas kedua negara juga menjadi perhatian utama (Ferida 2023).

3.2.4 Ideology

Dalam menghadapi dinamika politik dan ekonomi global, ideologi memainkan peran penting dalam membentuk arah kebijakan luar negeri suatu negara. Ideologi Jepang dalam konteks ini dapat dipahami sebagai perpaduan antara liberalisme ekonomi, pragmatisme politik, dan pasifisme konstitusional. Ketiga unsur tersebut berakar dari sejarah pasca-Perang Dunia II, ketika Jepang membangun kembali identitas nasionalnya sebagai negara damai dan berorientasi pada pembangunan ekonomi. Jepang menganut ideologi liberalisme ekonomi, yang menekankan pentingnya perdagangan bebas, kerja sama multilateral, dan integrasi pasar global. Ideologi ini tercermin dalam komitmen Jepang terhadap lembaga-lembaga internasional serta keterlibatannya dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas. Dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, liberalisme ekonomi mendorong Jepang untuk berperan sebagai penjaga keterbukaan pasar global dan menolak praktik proteksionisme yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dunia (Samodra 2023).

Jepang juga memperlihatkan pragmatisme diplomatiknya, yakni kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya sesuai dengan kepentingan nasional dan perubahan situasi internasional. Pragmatisme ini tampak dalam sikap Jepang yang berusaha menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat sebagai sekutu strategis utama, sambil tetap mempertahankan hubungan ekonomi yang erat dengan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar. Pendekatan pragmatis ini menunjukkan bahwa Jepang tidak semata-mata berpihak pada salah

satu kekuatan besar, tetapi lebih mengutamakan stabilitas dan kepentingan nasionalnya dalam jangka panjang (Nilsson-Wright 2020).

Selain itu, ideologi pasifisme konstitusional juga berpengaruh terhadap cara Jepang merespons konflik global, termasuk perang dagang. Berdasarkan Pasal 9 Konstitusi Jepang, negara ini menolak perang sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa internasional dan lebih memilih jalur diplomasi dan kerja sama ekonomi. Semangat pasifisme ini kemudian diterjemahkan ke dalam diplomasi ekonomi damai, di mana Jepang berupaya menciptakan stabilitas regional melalui pembangunan ekonomi bersama dan kerjasama perdagangan (Theinterpreter 2023).

3.2.5 Public Opinion

Persepsi publik Jepang terhadap perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok cenderung didominasi oleh kekhawatiran akan dampaknya terhadap stabilitas regional dan ekonomi Jepang. Masyarakat Jepang secara umum melihat konflik perdagangan antara dua kekuatan ekonomi besar ini sebagai sumber ketidakpastian yang signifikan dan berpotensi merugikan. Salah satu perhatian utama adalah kemungkinan terganggunya rantai pasokan global. Ekonomi Jepang sangat terintegrasi dengan rantai pasokan di Asia Timur, di mana baik Amerika Serikat maupun Tiongkok memainkan peran penting. Tarif dan pembatasan perdagangan dapat mengganggu aliran barang dan komponen, yang pada gilirannya dapat merugikan produksi dan daya saing perusahaan-perusahaan Jepang (Jain 2025).

Selain itu, masyarakat Jepang khawatir tentang potensi dampak resesi ekonomi global yang mungkin dipicu oleh perang dagang. Sebagai negara yang

sangat bergantung pada perdagangan internasional, penurunan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan Tiongkok dapat secara langsung mengurangi permintaan untuk ekspor Jepang. Kekhawatiran ini diperkuat oleh pengalaman masa lalu di mana gejolak ekonomi global berdampak signifikan terhadap kinerja ekonomi Jepang (Smeltz 2021).

Survei yang dilaporkan oleh Tiongkok daily pada 2 Desember 2024 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Jepang semakin mendukung kebijakan luar negeri yang seimbang, terutama dalam konteks hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Sebanyak 62,2% responden Jepang menyatakan bahwa Jepang sebaiknya tidak memihak dalam ketegangan antara dua kekuatan besar tersebut, melainkan mendorong kerja sama global. Selain itu, 37,8% responden percaya bahwa Jepang dan Tiongkok sebaiknya bekerja sama secara bilateral dengan meminimalkan dampak negatif dari hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat. Temuan lain dari survei tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden dari kedua negara menganggap satu sama lain sebagai mitra ekonomi penting. Sebanyak 58% responden Jepang dan 51,8% responden Tiongkok menilai negara lain sebagai mitra dagang utama. Bahkan, 65,3% warga Jepang menganggap bahwa kerja sama ekonomi dengan Tiongkok penting bagi masa depan negara mereka (Xueqing 2024).

Posisi unik Jepang sebagai sekutu keamanan yang kuat bagi Amerika Serikat namun juga sebagai mitra dagang utama bagi Tiongkok memberikan dasar yang kuat bagi harapan ini. Masyarakat Jepang melihat posisi ini bukan sebagai dilema, melainkan sebagai keuntungan strategis yang memungkinkan Jepang untuk memahami perspektif kedua belah pihak secara mendalam dan bertindak

sebagai jembatan komunikasi yang efektif. Harapan ini juga didorong oleh tekanan dari sektor bisnis domestik, yang sangat merasakan dampak ketidakpastian ekonomi akibat perang dagang dan akan sangat mendukung setiap upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Dukungan publik terhadap multilateralisme dan tatanan internasional berbasis aturan juga sejalan dengan harapan agar Jepang berperan aktif dalam mediasi, karena tindakan ini dianggap sebagai kontribusi nyata dalam memperkuat sistem internasional yang diyakini penting bagi perdamaian dan kemakmuran global (The Genron NPO 2019).

Kelompok bisnis di Jepang secara umum sangat prihatin dengan konflik perdagangan yang terjadi. Mereka menganggap konflik tersebut sebuah ancaman langsung terhadap rantai pasokan global yang rumit dan saling terkait, di mana perusahaan-perusahaan Jepang memiliki investasi dan operasi yang signifikan di kedua negara. Kekhawatiran utama meliputi potensi kenaikan tarif yang merugikan daya saing produk Jepang, gangguan dalam logistik dan transportasi, ketidakpastian dalam perencanaan bisnis jangka panjang, dan risiko penurunan permintaan di pasar Amerika Serikat dan Tiongkok. Kelompok bisnis cenderung mendukung peran aktif pemerintah Jepang dalam menghadapi ketegangan tersebut melalui diplomasi dan multilateralisme. Mereka menyuarakan opini mereka melalui pernyataan pers, lobi langsung kepada pemerintah, forum bisnis, dan publikasi laporan ekonomi. Beberapa sektor industri yang sangat terpapar, seperti otomotif dan elektronik, mungkin secara lebih vokal menyerukan tindakan pemerintah yang lebih kuat (Chang et al. 2019).

Media massa di Jepang memainkan peran penting dalam membentuk opini publik tentang perang dagang dan potensi peran Jepang. Beberapa media cenderung melaporkan secara ekstensif tentang perkembangan perang dagang, menganalisis dampaknya terhadap ekonomi Jepang dan global, serta menyoroti berbagai pandangan dari kelompok kepentingan dan politisi. Salah satu contoh media Reuter Jepang mengambil editorial yang mendukung peran mediasi aktif Jepang, menekankan pentingnya stabilitas regional dan hubungan baik dengan kedua negara. Media lain mungkin lebih fokus pada risiko dan tantangan yang dihadapi Jepang, atau mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap kurang efektif. Pemberitaan dan analisis media massa dapat mempengaruhi opini publik dan memberikan tekanan tidak langsung kepada pemerintah untuk mengambil tindakan (Kumano 2024).

BAB 4

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jepang dalam konflik menghadapi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada periode 2019 hingga 2025 dengan menggunakan teori peran K.J. Holsti. Berdasarkan empat elemen utama teori peran *alter role prescriptions*, *national role conception*, *nation's status*, dan *foreign policy role performance* penelitian ini menemukan bahwa Jepang menampilkan karakteristik sebagai negara *active independent*.

Sebagai *active independent*, Jepang secara aktif berpartisipasi dalam sistem internasional dan memainkan peran konstruktif dalam menjaga stabilitas ekonomi global, namun tetap mempertahankan kemandirian strategis dari dominasi Amerika Serikat maupun Tiongkok. Jepang tidak memosisikan diri sebagai penengah netral, melainkan sebagai aktor yang berupaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tekanan eksternal, melalui kebijakan luar negeri yang adaptif dan berbasis pada *prinsip rules-based order*.

Dalam konteks perang dagang, Jepang menghadapi dilema strategis antara komitmen aliansi keamanan dengan Amerika Serikat dan ketergantungan ekonominya terhadap Tiongkok. Namun, Jepang berhasil menavigasi dilema tersebut melalui diplomasi multilateral, diversifikasi ekonomi, dan kebijakan *economic security* yang pragmatis. Langkah ini mencerminkan fleksibilitas diplomasi Jepang dalam mengelola hubungan dengan dua kekuatan besar tanpa kehilangan otonomi kebijakan nasional.

Status Jepang sebagai anggota G7, RCEP, dan CPTPP memperkuat kapasitasnya sebagai aktor normatif yang konsisten dalam mendukung perdagangan bebas dan menolak proteksionisme. Keikutsertaan Jepang dalam berbagai forum multilateral juga memperlihatkan peran aktifnya dalam mempertahankan stabilitas ekonomi kawasan dan memperjuangkan reformasi tata kelola perdagangan global.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Jepang sebagai *active independent* menunjukkan transformasi diplomasi Jepang dari sekutu pasif menjadi aktor mandiri yang adaptif dan visioner. Jepang bukan hanya mempertahankan kepentingan nasionalnya, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi internasional melalui diplomasi berbasis norma, etika, dan komitmen terhadap hukum internasional.

2.2 Rekomendasi

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memahami peran Jepang sebagai *active independent* dalam menghadapi konflik perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Asia Timur selama periode 2019 hingga 2025. Namun, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menjadi peluang bagi penelitian di masa mendatang.

Salah satu keterbatasan utama penelitian ini terletak pada batasan periode waktu 2019–2025, sementara dinamika hubungan antara Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok bersifat jangka panjang dan terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian mendatang dianjurkan untuk memperluas cakupan temporal agar dapat menganalisis bagaimana evolusi kebijakan luar negeri Jepang dan perubahan strategi *active independence* terjadi sebelum dan sesudah periode tersebut.

Dengan memperluas periode analisis, penelitian selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsistensi Jepang dalam menjaga otonomi strategisnya di tengah rivalitas dua kekuatan besar dunia.

Selain itu, pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikombinasikan dengan analisis kuantitatif untuk memperkaya hasil. Misalnya, penelitian lanjutan dapat mengukur pengaruh kebijakan *economic security* Jepang terhadap volume perdagangan internasional, stabilitas rantai pasok global, atau tingkat ketergantungan ekonomi bilateral Jepang terhadap Amerika Serikat dan Tiongkok. Dengan menggunakan data statistik, penelitian mendatang dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai efektivitas kebijakan luar negeri Jepang sebagai negara *active independent*.

Lebih lanjut, studi perbandingan juga dapat menjadi pendekatan yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Melibatkan negara-negara *middle power* lain seperti Korea Selatan, Australia, atau India akan membantu menelaah bagaimana masing-masing negara mempertahankan kemandirian kebijakan luar negeri di tengah tekanan geopolitik dari kekuatan besar. Perbandingan semacam ini dapat memperkaya literatur tentang strategi diplomasi otonom di kawasan Indo-Pasifik.

Dengan memperluas dimensi waktu, metode, dan perspektif analisis, diharapkan penelitian mendatang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Jepang mempertahankan peran *active independent*-nya dalam sistem internasional. Selain itu, kajian lanjutan diharapkan mampu menjelaskan lebih jauh bagaimana strategi diplomasi otonom Jepang

berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan politik di kawasan Asia Timur serta memperkuat tatanan global berbasis aturan (*rules-based international order*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aftoni, Yasril Faza. 2021. "Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap ASEAN Melalui AJCEP." kumparan, July 9. <https://kumparan.com/yasril-faza-1625485728857963820/kebijakan-luar-negeri-jepang-terhadap-asean-melalui-ajcep-1w4k2RLBHeq>.
- ASEAN Secretariat. n.d. "CPTPP Project." Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). *Asia Pacific Initiative* アジア・パシフィック・イニシアティブ. Accessed May 29, 2025. <https://apinitiative.org/en/project/cptpp/>.
- BBC. 2020. "A Quick Guide to the US-China Trade War." January 16. <https://www.bbc.com/news/business-45899310>.
- Brattberg, Erik. 2021. "Middle Power Diplomacy in an Age of US-China Tensions." *The Washington Quarterly* 44 (1): 219–38. <https://doi.org/10.1080/0163660X.2021.1896136>.
- Camellia, Anisa. 2025. "Rantai Pasok Global Terguncang Akibat Perang AS-Tiongkok, Apa Dampaknya?" kumparan. <https://kumparan.com/anisa-camellia/rantai-pasok-global-terguncang-akibat-perang-as-tiongkok-apa-dampaknya-251Ve49U4wV>.
- Chang, SUN, TAO Zhigang, YUAN Hongjie, and ZHANG Hongyong. 2019. "Articles 「The Impact of the US-China Trade War on Japanese Multinational Corporations」 ." Research Institute of Economy, Trade and Industry, December 20. https://www.rieti.go.jp/en/columns/v01_0132.html.
- Chong, Ja Ian. 2018. *ASEAN and the Challenge of a Multipolar World | East Asia Forum*. ASEAN. September 12. <https://eastasiaforum.org/2018/09/12/asean-and-the-challenge-of-a-multipolar-world/>.
- Choudhury, Srabani Roy. 2024. *Japan's Technology Diplomacy: A Critical Link for Free and Open Indo-Pacific*. July.
- CNN Indonesia. 2025. "Jepang Harap RI Mau Kompak Bujuk Trump soal Perang Dagang AS." CNN Indonesia, February 21. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250221092559-113-1200848/jepang-harap-ri-mau-kompak-bujuk-trump-soal-perang-dagang-as>.
- DeeMa. 2025. "Korea Selatan, China, dan Jepang Sepakat Dorong Perdagangan Regional di Tengah Ancaman Tarif Trump." *elmedia.id*, March 31. <https://elmedia.id/korea-selatan-china-dan-jepang-sepakat-dorong-perdagangan-regional-di-tengah-ancaman-tarif-trump/>.
- EAFeditors. 2025. *Japan Repositions Its Diplomacy towards China | East Asia Forum*. Japan. March 31. <https://eastasiaforum.org/2025/03/31/japan-repositions-its-diplomacy-towards-china/>.
- Ferida, Khairisa. 2023. "Sebut China Tantangan Terbesar, Jepang Tingkatkan Belanja Pertahanan hingga Sambangi Amerika Serikat." *liputan6.com*, January 14. <https://www.liputan6.com/global/read/5179701/sebut-china-tantangan-terbesar-jepang-tingkatkan-belanja-pertahanan-hingga-sambangi-amerika-serikat>.

- Frishanti, Cindy. 2024. "Jepang ingin perkuat hubungan dengan ASEAN atas rasa saling percaya." Antara News, July 18.
<https://www.antaranews.com/berita/4203135/jepang-ingin-perkuat-hubungan-dengan-asean-atas-rasa-saling-percaya>.
- Fukunari, Kimura. 2024. "RIETI - A New Phase of the U.S.-China Trade War: Japan Should Support the Order through Cooperation with Emerging Countries." July 18.
<https://www.rieti.go.jp/en/papers/contribution/kimura-fukunari/05.html>.
- G7 Japan. 2023. *G7 JAPAN 2023 FOREIGN MINISTERS' COMMUNIQUÉ APRIL 18, 2023 KARUIZAWA, NAGANO*. no. 141 (July): 199–216.
<https://doi.org/10.26797/rpye.vi141.1046>.
- "Government of Japan and the World Trade Organization Secretariat." n.d. Accessed May 29, 2025.
https://www.meti.go.jp/press/2025/05/20250513002/20250513002-a.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- Holsti, K. J. 1970. "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy." *International Studies Quarterly* 14 (3). <https://doi.org/10.2307/3013584>.
- Holsti, K. J. 1981. *International Politics: A Framework for Analysis*. 3rd edition. Prentice-Hall of India Private Limited.
- Hynd, Alexander M, and Thomas Wilkins. 2023. *INDO-PACIFIC MIDDLE POWERS: RETHINKING ROLES AND PREFERENCES*.
- Jain, Purnendra. 2025. *Japan's ODA Engagement with India and Bangladesh Focusing on Connectivity*. February 19.
- Japan Ministry of Defense. n.d. "Achieving the 'Free and Open Indo-Pacific (FOIP)' Vision Japan Ministry of Defense's Approach." Japan Ministry of Defense. Accessed May 29, 2025. <https://www.mod.go.jp/en/>.
- JETRO. 2024. "Section2. Trends in Inward FDI to Japan by Country/Region | Chapter2. Trends in Inward FDI to Japan - JETRO Invest Japan Report 2024 - Reports - Why Invest - Investing in Japan - Japan External Trade Organization - JETRO."
https://www.jetro.go.jp/en/invest/investment_environment/ijre/report2024/ch2/sec2.html.
- JETRO. 2025a. "Section 2. Trends in Inward FDI to Japan by Country and Region | Chapter2. Trends in Inward FDI in Japan Invest Japan Report 2023 - Reports - Why Invest - Investing in Japan - Japan External Trade Organization."
https://www.jetro.go.jp/en/invest/investment_environment/ijre/report2023/ch2/sec2.html.
- JETRO. 2025b. "Section2. Trends in Inward FDI to Japan by Country/Region | Chapter2. Trends in Inward FDI to Japan Invest Japan Report 2024 - Reports - Why Invest - Investing in Japan - Japan External Trade Organization."
https://www.jetro.go.jp/en/invest/investment_environment/ijre/report2024/ch2/sec2.html.
- "JETRO." n.d. Accessed May 31, 2025.
https://www.jetro.go.jp/ext_images/en/reports/white_paper/trade_invest_2024.pdf.

- Katriana. 2023. “Jepang dukung sentralitas ASEAN dan pandangan ASEAN di Indo Pasifik.” *Antara News*, September 6.
<https://www.antaraneews.com/berita/3713997/jepang-dukung-sentralitas-asean-dan-pandangan-asean-di-indo-pasifik>.
- Kazunobu, Hayakawa, and Ito Keiko. 2025. “Articles 「The Ripple beyond Borders: Indirect Effects of US Export Controls on Japanese Firms」 .”
https://www.rieti.go.jp/en/columns/v01_0227.html.
- Kementerian pertahanan Republik Indonesia. 2025. “Badan Penelitian Dan Pengembangan Kemhan RI.” *Perang Dagang AS–Tiongkok: Dampak, Peluang, Tantangan Dan Solusi Strategis Bagi Indonesia*, April 16.
<https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/04/16/perang-dagang-as-tiongkok-dampak-peluang-tantangan-dan-solusi-strategis-bagi-indonesia.html>.
- Kumano Hideo. 2024. “コラム：トランプ関税が日本に与える影響、まだある隠れリスク＝熊野英生氏。” *外国為替フォーラム. Reuters*, November 15. <https://jp.reuters.com/opinion/forex-forum/3IZ2NGLVQBM7LELMACWAIF5IMM-2024-11-14/>.
- kumparanBISNIS. 2019. “Setelah AS vs China, Perang Dagang Kini Meluas ke Jepang vs Korsel.” *kumparanBISNIS*, July 11.
<https://kumparan.com/kumparanbisnis/setelah-as-vs-china-perang-dagang-kini-meluas-ke-jepang-vs-korsel-1rRmRCC1muV>.
- Lipsy, Phillip Y. 2020. “How Do States Renegotiate International Institutions? Japan’s Renegotiation Diplomacy Since World War II.” *Global Policy* 11 (S3): 17–27. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12833>.
- Mcgill, Ayaka, and Mari Yamaguchi. 2025. “Japan’s Ishiba Warns against Tension over Tariffs and Vows to Expand Asia-Pacific Trade Group.” *AP News*, May 29. <https://apnews.com/article/japan-ishiba-us-trade-tariff-f57df97cee97f2bea9230fb269016cf8>.
- Ministry of defense. n.d. “Japan-U.S. Security Treaty.” Ministry of Defense. Accessed May 31, 2025. https://www.mod.go.jp/en/j-us-alliance/joint-declaration/treaty/index.html?utm_source=chatgpt.com.
- Ministry of Foreign Affair of Japan. n.d.-a. “MOFA: Japan-China Joint Declaration On Building a Partnership of Friendship and Cooperation for Peace and Development.” Ministry of Foreign Affair of Japan. Accessed May 31, 2025. https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/visit98/joint.html?utm_source=chatgpt.com.
- Ministry of Foreign Affair of Japan. n.d.-b. “MOFA: Japan-U.S. Security Treaty.” Ministry of Foreign Affair of Japan. Accessed May 31, 2025. https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q%26a/ref/1.html?utm_source=chatgpt.com.
- Ministry of Foreign Affair of Japan. n.d.-c. “Promotion of Relations with Other Countries.” Ministry of Foreign Affair of Japan. Accessed May 31, 2025. https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1974/1974-3-1.htm?utm_source=chatgpt.com.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2020a. “Diplomatic Bluebook 2020: Chapter 3, Section 3 – Economic Diplomacy: 2 Rule-Making to Bolster Free and Open Global Economic Systems.” Ministry of Foreign Affairs of Japan. <https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/index.html>.

- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2020b. “Diplomatic Bluebook Diplomacy to Defend National Interests through Co-Creation with the World.” Ministry of Foreign Affairs of Japan.
<https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/index.html>.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2020c. “Diplomatic Bluebook Japan’s Foreign Policy to Promote National and Global Interests.” Ministry of Foreign Affairs of Japan.
<https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/index.html>.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2020d. “Diplomatic Bluebook Overview of the International Situation and Outlook for Japan’s Diplomacy Message to the World at a Turning Point in History - Human Dignity.” Ministry of Foreign Affairs of Japan.
<https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/index.html>.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2022. “Diplomatic Bluebook Japan Strengthening Its Presence in the International Community.” Ministry of Foreign Affairs of Japan.
<https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/index.html>.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2025. “Japan-U.S. Summit Meeting | Ministry of Foreign Affairs of Japan.” February 7.
https://www.mofa.go.jp/na/na1/us/pageite_000001_00800.html?utm_source=chatgpt.com.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. n.d. “Diplomatic Bluebook.” Accessed October 7, 2025.
<https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/index.html>.
- Ministry of Foreign Affairs People’s Republic of China. 2019. “Xi Jinping Meets with President Donald Trump of the United States (US)_Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China.” June 29.
https://www.mfa.gov.cn/mfa_eng/zy/jj/2019zt/xjpcxesgjtfh/202406/t20240606_11379962.html.
- Ministry of Foreign Affairs People’s Republic of China. 2025a. “Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba Meets with Wang Yi_Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China.” March 21.
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbzhd/202503/t20250322_11580309.html?utm_source=chatgpt.com.
- Ministry of Foreign Affairs People’s Republic of China. 2025b. “Wang Huning Meets with the Delegation of Japan’s Komeito Party_Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China.” April 23.
https://www.fmprc.gov.cn/eng/gjhdq_665435/2675_665437/2721_663446/2724_663452/202504/t20250429_11609177.html.
- Mitchell, Andrew D. 2006. “Good Faith in WTO Dispute Settlement.” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3157444>.
- Murakami, Sakura, and Mari Kiyohara. 2025. “Jepang Upayakan Jalur Tengah Di Perang Dagang AS-China - Global.” April 22.
<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/69086/jepang-upayakan-jalur-tengah-di-perang-dagang-as-china>.
- Nilsson-Wright, Dr John. 2020. “Shinzo Abe dan warisannya bagi Jepang setelah mundur sebagai PM: Sosok nasionalis revisionis atau realis pragmatis?”

- BBC News Indonesia, August 31. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53970428>.
- Oba, Mie. 2025. "Japan and the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)." In *Political Economy of East Asian Economic Integration*, 1st ed., by Fusanori Iwasaki, Keita Oikawa, and Shujiro Urata. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781032624044-8>.
- Prabandari, Ayu Isti. 2025. "Tujuan Perdagangan Bebas: Manfaat dan Dampaknya bagi Perekonomian Global." *liputan6.com*, February 2. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5904461/tujuan-perdagangan-bebas-manfaat-dan-dampaknya-bagi-perekonomian-global>.
- Prime Minister's Office of Japan. 2023. "Policy Speech by Prime Minister KISHIDA Fumio at the Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS)." Prime Minister's Office of Japan, January 13. https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202301/_00005.html.
- Pryanka, Adinda. 2019. "Jepang Dapat Untung dari Perang Dagang China-AS." *Republika Online*, September 5. <https://republika.co.id/share/pxd6ft368>.
- Reuters. 2019. "Jepang pangkas target ekspor sebagai dampak perang dagang AS-China." *kontan.co.id*, January 29. <https://internasional.kontan.co.id/news/jepang-pangkas-target-ekspor-sebagai-dampak-perang-dagang-as-china>.
- Sabadosa, Zack, Maria Claudia Rengifo, Pilar Sofia Resendez, Adrian Rosario Beato, Eman Said, and Kara Styers. 2024. "Trade Titans: The Impact of the U.S.-China Trade War on Global Economics." Cornell SC Johnson, June 14. <https://business.cornell.edu/hub/2024/06/14/trade-titans-impact-us-china-trade-war-global-economics/>.
- Sahashi, Ryo. 2020. "Japan's Strategy amid US-China Confrontation." *China International Strategy Review* 2 (2): 232-45. <https://doi.org/10.1007/s42533-020-00061-9>.
- Samodra, Fitriyani Puspa. 2023. "Liberal adalah Ideologi Kebebasan, Berikut Sejarah, Ciri, dan Negara Penganutnya." *liputan6.com*, April 10. <https://www.liputan6.com/hot/read/5256601/liberal-adalah-ideologi-kebebasan-berikut-sejarah-ciri-dan-negara-penganutnya>.
- Santander. 2025. "Japanese Foreign Trade in Figures." Santander Trade Markets, May. <https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/japan/foreign-trade-in-figures>.
- Satake, Tomohiko, and Ryo Sahashi. 2021. "The Rise of China and Japan's 'Vision' for Free and Open Indo-Pacific." *Journal of Contemporary China* 30 (127): 18-35. <https://doi.org/10.1080/10670564.2020.1766907>.
- Searight, Amy. 2024. *Expanding the US-Japan Economic Security Partnership: Engaging Allies and Partners*. Atlantic Council. <https://www.jstor.org/stable/resrep63524>.
- sef. 2025. "Breaking: Ekspor Jepang Anjlok, Terdalam Selama 4 Tahun." *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250820101123-4-659587/breaking-ekspor-jepang-anjlok-terdalam-selama-4-tahun>.
- Smeltz, Dina. 2021. "Japanese Public Values Ties to US, But Would Prefer to Cooperate with China, Too." Research. The Chicago Council on Global Affairs, April 28. <https://globalaffairs.org/research/public-opinion-survey/japanese-public-values-ties-us-would-prefer-cooperate-china-too>.

- Snatika. n.d. "Principles of the World Trade Organisation (WTO)." SNATIKA. Accessed May 29, 2025. <https://snatika.com/single-blog/principles-of-the-world-trade-organisation-wto>.
- Soehandoko, Jessica Gabriela. 2024. "China Bahas Kerja Sama Perdagangan Bebas dengan Korsel dan Jepang." *Bisnis.com*, May 27. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240527/620/1768642/china-bahas-kerja-sama-perdagangan-bebas-dengan-korsel-dan-jepang>.
- Soeya, Yoshihide. 2012. "Japanese Middle-Power Diplomacy - East Asia Forum." *International Relations. East Asia Forum Quarterly: Volume 4, Number 3, 2012* 4 (3): 22–23.
- South East Asia Public Policy Institute. 2025. "Southeast Asia Global Relations Outlook Part 5: Longstanding and Rising Alternative Partners." *South East Asia Public Policy Institute*, February 11. <https://seapublicpolicy.org/southeast-asia-global-relations-outlook-part-5-longstanding-and-rising-alternative-partners/>.
- Statistics Bureau of Japan. 2024. "Statistics Bureau Home Page/News Bulletin January 25, 2024." January 25. <https://www.stat.go.jp/english/info/news/20240125.html>.
- Strangio, Sebastian. 2025. "Japan 'Gravely Concerned' About South China Sea Tensions, FM Says." *The Diplomat*, January 16. <https://thediplomat.com/2025/01/japan-gravely-concerned-about-south-china-sea-tensions-fm-says/>.
- Syahrin, M Najeri Al. 2019. *REALITAS, KOMPLEKSITAS DAN RIVALITAS*.
- Taufani, Muhammad Reza Ilham. 2023. "Membongkar Perang Dagang AS Vs China & Upaya Dedolarisasi." *CNBC Indonesia*, April 23. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230421165302-128-431640/membongkar-perang-dagang-as-vs-china-upaya-dedolarisasi>.
- Thalia, Nabila. 2024. "Persaingan Geo-Politik antara Amerika Serikat dan Tiongkok." *KOMPASIANA*, November 7. <https://www.kompasiana.com/thalianabila/672cc43eed6415777f6f8413/persaingan-geo-politik-antara-amerika-serikat-dan-tiongkok>.
- The Genron NPO. 2019. "Deepening U.S.-China confrontation and Japan's role as mediator." *The Genron NPO*, March 28. <https://www.genron-npo.net/en/was/archives/5484.html>.
- The White House. 2025. "Fact Sheet: President Donald J. Trump Secures Unprecedented U.S.–Japan Strategic Trade and Investment Agreement." *The White House*, July 23. <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/07/fact-sheet-president-donald-j-trump-secures-unprecedented-u-s-japan-strategic-trade-and-investment-agreement/>.
- Theinterpreter. 2023. "Japan's Article 9: Pacifism and Protests as Defence Budget Doubles | Lowy Institute." May 5. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/japan-s-article-9-pacifism-protests-defence-budget-doubles>.
- Tsvety. 2024. *Pacta Sunt Servanda - The Law To Know*. LAW. February 23. <https://thelawtoknow.com/2024/02/23/pacta-sunt-servanda/>.
- United States and Japan. n.d. "Avalon Project - Security Treaty Between the United States and Japan; September 8, 1951." *Yale Law School*. Accessed May 31, 2025. https://avalon.law.yale.edu/20th_century/japan001.asp.

- United States Trade Representative. n.d. "United States and Japan Sign Critical Minerals Agreement." United States Trade Representative. Accessed May 31, 2025. <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2023/march/united-states-and-japan-sign-critical-minerals-agreement>.
- Wahyuni, Rifani Agnes Eka. 2024. "Pesan Strategis Jepang Yang Terus Berkembang Ke Indo-Pasifik Dan Sekitarnya." *DIP Institute*, January 4. <https://dip.or.id/2024/01/04/pesan-strategis-jepang-yang-terus-berkembang-ke-indo-pasifik-dan-sekitarnya/>.
- Wilkins, Dr Thomas. 2024. "Japan and Multipolarity in the Indo-Pacific: National Mobilisation and Resilience." February 29. <https://www.ussc.edu.au/japan-and-multipolarity-in-the-indo-pacific-national-mobilisation-and-resilience>.
- World Trade Organization. n.d. "WTO | Managing the Challenges of WTO Participation: Case Study." Accessed October 6, 2025. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/casestudies_e/case11_e.htm?utm.
- World trade organization. n.d. "WTO - Japan: Dispute Settlement News Archive." World Trade Organization. Accessed May 31, 2025. https://www.wto.org/english/news_e/archive_e/country_subj_arc_e.htm?country1=JPN&subject1=DISP&utm_source=chatgpt.com.
- "WTO | Trade and Environment." n.d. Accessed May 31, 2025. https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envt_rules_gatt_e.htm?utm_source=chatgpt.com.
- Xing, Yuqing. 2024. *Japan's Plan to Restructure Global Supply Chains | East Asia Forum*. China. August 2. <https://eastasiaforum.org/2024/08/02/japans-plan-to-restructure-global-supply-chains/>.
- Xinhua. 2023. "Media Jepang: Pemisahan rantai pasok dari China picu kenaikan harga." Antara News, January 4. <https://www.antaranews.com/berita/3335259/media-jepang-pemisahan-rantai-pasok-dari-china-picu-kenaikan-harga>.
- Xueqing, Jiang. 2024. "Survey Finds More Japanese Favor Balanced Foreign Policies." ChinaDaily. <https://global.chinadaily.com.cn/a/202412/02/WS674db333a310f1265a1d0a47.html>.
- Yaita, Akio. 2024. "Japanese Companies Transferring Production from China to Southeast Asia." INQUIRER.Net, November 20. <https://business.inquirer.net/491085/japanese-companies-transferring-production-from-china-to-southeast-asia>.
- Yamaguchi, Takaya, Leika Kihara, and Makiko Yamazaki. 2025. "Exclusive: Japan Finance Minister 'deeply Concerned' over Trump Tariff Impact." World. *Reuters*, April 17. <https://www.reuters.com/world/japan-finance-minister-deeply-concerned-over-trump-tariff-impact-2025-04-17/>.
- Yamazaki, Makiko. 2024. "Japan's Exports Fall for First Time in 10 Months on China, US Slowdown." Reuters. <https://www.reuters.com/world/japan/japans-september-exports-post-first-fall-10-months-2024-10-17/>.

